



PrADa

Profil dan Analisis Daerah

**Provinsi:
PAPUA, 2017**

Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional

Tim Penyusun



Penanggung Jawab:
Ir. Rudy S. Prawiradinata, MCRP, Ph.D
Deputi Bidang Pengembangan Regional



Ketua Tim Pelaksana:
Drs. Oktoraldi, MA, Ph.D
Direktur Pengembangan Wilayah
dan Kawasan



Anggota Tim Pelaksana:
Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM
Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Permukiman



Anggota Tim Pelaksana:
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi
dan Perdesaan



Anggota Tim Pelaksana:
Ir. Aryawan Soetiarso Poetro, MSI
Direktur Otonomi Daerah



Anggota Tim Pelaksana:
Uke Muhammad Hussein, SSI, MPP
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**



Kata Pengantar



Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antardaerah atau ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Selanjutnya dalam perspektif pembangunan wilayah, upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak dapat dilakukan hanya dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi lebih jauh dari pada itu yakni pentingnya untuk memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta ketersediaan infrastruktur pendukung wilayah lainnya. Faktor-faktor tersebut, merupakan kunci utama bagi daerah dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya, terlepas dari adanya perbedaan *resources* yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) yang disusun ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kepentingan pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah, melalui program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah dengan fokus utama pada aspek pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Jakarta, Desember 2017
Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Rudy S. Prawiradinata

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**



DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI**

Bab-1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Manfaat	5
Bab-2 METODOLOGI	6
2.1. Lingkup Kegiatan	7
2.2. Metode Analisis	7
Bab-3 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL PROVINSI PAPUA	11
3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua	12
3.2. Tingkat Kemiskinan	14
3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16
Bab-4 PrADa PROVINSI PAPUA	17
4.1. Tematik Pendidikan	20
4.2. Tematik Kesehatan	28
4.3. Tematik Penanggulangan Kemiskinan	36
4.4. Tematik Perumahan dan Permukiman	43
4.5. Tematik Ketahanan Pangan	53
4.6. Tematik Ketahanan Energi	62
4.7. Tematik Infrastruktur	70
4.8. Tematik Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan	77
Bab-5 PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Rekomendasi	83

Bab-1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar-daerah atau ketimpangan wilayah. Berkaitan dengan itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo, dua dari tiga masalah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah bersangkutan dengan masalah ketimpangan atau kesenjangan, yaitu ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat dan ketidakseimbangan ekonomi antar-daerah. Satu masalah lainnya adalah persoalan lapangan kerja produktif dan pengangguran (Djojohadikusumo, 1994:191). Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar-daerah selalu menjadi salah satu isu utama pembangunan daerah di Indonesia.

Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi adalah merupakan suatu keniscayaan, baik dalam tataran antar-negara maupun antar-daerah di suatu negara. Fenomena kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan dalam alokasi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi. Hirschman melihat bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi dalam perkembangan ekonomi antar-negara, tetapi terjadi juga kesenjangan dalam perkembangan wilayah. Jika di dunia ini terdapat negara-negara maju dan negara-negara terbelakang, maka dalam suatu negara pun terdapat wilayah-wilayah yang maju dan wilayah-wilayah yang terbelakang (Nurzaman, 2002:91).

Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam kerangka yang lebih luas, kesenjangan yang terjadi di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih dilatarbelakangi oleh hampir seluruh perbedaan tersebut, yaitu aktivitas ekonomi, kondisi alam dan juga administratif.

Asal dari kesenjangan antar-daerah atau kesenjangan wilayah menurut Myrdal berakar pada persoalan non ekonomi dan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif ini mendorong terpusatnya pembangunan pada wilayah-wilayah yang memberikan harapan laba yang tinggi, sedangkan wilayah-wilayah yang tidak menjanjikan laba yang tinggi akan tetap terbelakang atau mengalami stagnasi (Myrdal dalam Roudo, 2004:25).

Banyak sekali teori dan konsep yang berusaha menjelaskan mekanisme terjadinya kesenjangan serta mekanisme untuk mengurangi kesenjangan itu. Teori *polarization effect* misalnya menjelaskan kecenderungan semakin besarnya kesenjangan akibat terjadinya aliran faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah maju, sementara teori *trickling down effect* menjelaskan kecenderungan kesenjangan yang semakin mengecil karena berpindahnya sumber daya (terutama modal) ke wilayah yang terbelakang akibat sudah tidak efisiennya lagi ekonomi di wilayah yang sudah maju. Dalam konsep yang lain namun masih dalam gagasan yang sama, fenomena membesarnya kesenjangan disebut sebagai akibat dari terjadinya *backwash effect*, sedangkan fenomena mengecilnya kesenjangan adalah akibat terjadinya *spread effect*. Pandangan optimis diwakili oleh Hirschman yang berpendapat bahwa pada suatu saat *trickling down effect* akan bekerja lebih kuat daripada *polarization effect* (sehingga kesenjangan akan berkurang), sementara Myrdal mewakili pandangan yang lebih pesimis karena menurutnya *backwash effect* akan selalu lebih besar daripada *spread effect* (yang artinya kesenjangan akan cenderung semakin besar).

Jadi permasalahannya meskipun kesenjangan adalah suatu keniscayaan dalam perkembangan wilayah, namun kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan (*divergensi*) atau semakin mengecilnya kesenjangan (*konvergensi*) selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Kuznets yang merupakan pelopor dalam analisis empirik terhadap pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, menemukan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, tetapi akan membaik pada tahap-tahap berikutnya. Observasi inilah yang dikenal luas sebagai konsep kurva U-terbalik dari Kuznets (Kuncoro, 2004:129).

Pada tingkat wilayah atau regional, adalah Williamson yang mencoba memahami fenomena *divergensi* dan *konvergensi* wilayah secara empirik, yaitu dengan mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan (dinyatakan dengan PDRB) yang berbeda (Nurzaman, 2002:95). Williamson menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas atau kesenjangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang, tampak adanya keseimbangan antar-daerah dan disparitas berkurang secara signifikan (Kuncoro, 2004:133). Dapat dikatakan bahwa Williamson adalah yang pertama kali secara eksplisit memberi dimensi spasial kepada kurva U-terbaliknya Kuznets, yaitu dengan tidak memfokuskan kepada kesenjangan pendapatan rumah tangga melainkan kepada kesenjangan antar-wilayah di tingkat pendapatan perkapita.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah, harus dapat didukung dengan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan pembangunan dimasing-masing daerah. Hal ini mengingat bahwa, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan oleh karenanya dalam menyusun usulan program/kegiatan yang akan dirumuskan tidak dapat disamaratakan (simetris) dan harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah (asimetris).

Selanjutnya untuk dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk masing-masing daerah, khususnya yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah baik melalui pendekatan statistik maupun spasial. Sejalan dengan hal tersebut, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, telah melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan di atas, dan untuk selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka merumuskan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah.

2.2. Tujuan

- (1). Mengumpulkan dan menganalisis data-data statistik yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder;
- (2). Memetakan data-data yang diperoleh dari hasil analisis statistik/tabular ke dalam bentuk *Geographic Information System* (GIS);
- (3). Melaksanakan FGD dengan daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.
- (4). Melaksanakan konsinyiring/*workshop* di pusat (Jakarta), tujuannya adalah untuk memperoleh berbagai masukan/saran untuk penyempurnaan penyusunan PrADa, termasuk membahas hasil-hasil pelaksanaan FGD di daerah;
- (5). Menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk indikasi program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah;
- (6). Menyusun laporan PrADa dalam rangka, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertajam perencanaan pembangunan nasional yang berbasis kewilayahan.

1.3. Manfaat

Manfaat dari terlaksana dan tersusunnya PrADa ini, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan nasional/daerah, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan utamanya dalam menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Disamping itu model analisis melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan PrADa ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Bab-2

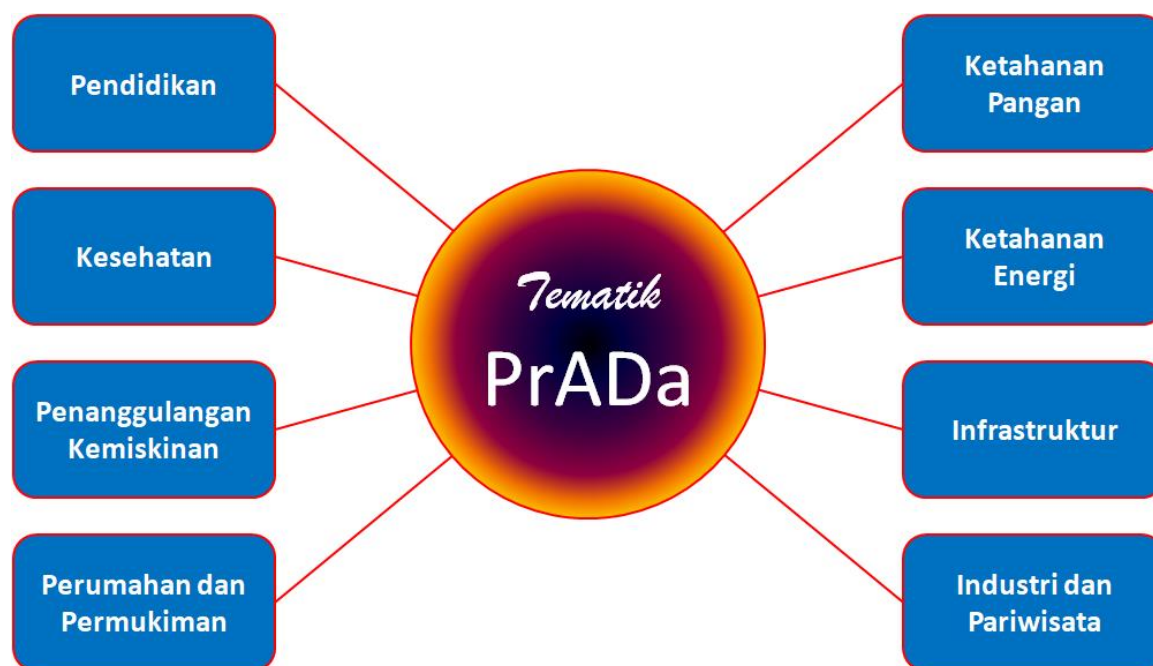
METODOLOGI



2.1. Lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan PrADa ini akan difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Gambar 2.1
Lingkup Tematik Penyusunan PrADa

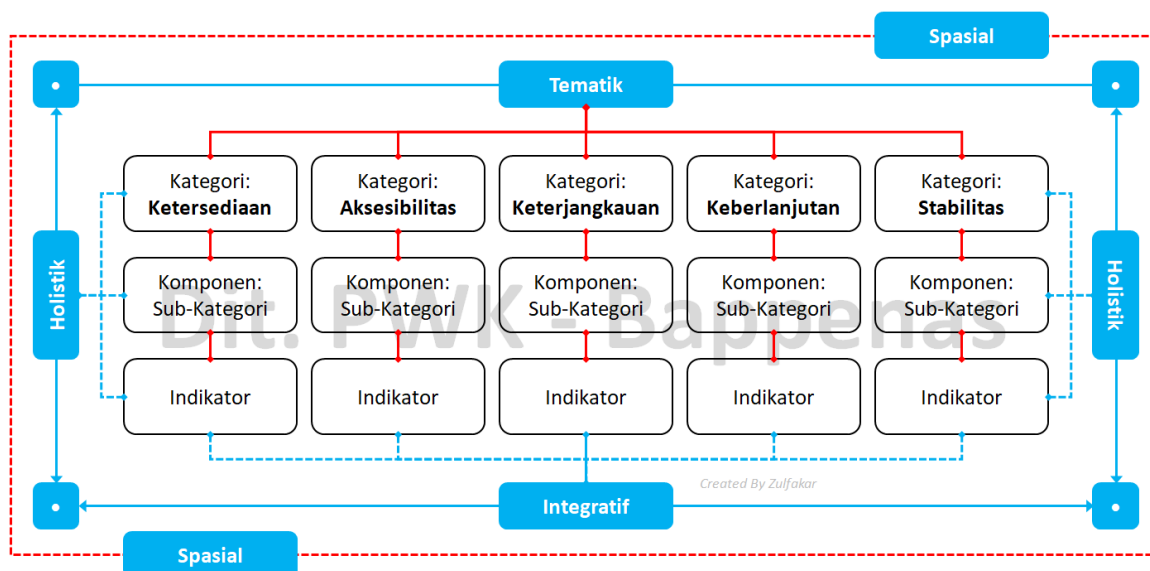


2.2. Metode Analisis

Model analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini melalui metode analisis dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun yang dimaksud dengan "**Tematik**" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan; "**Holistik**" adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan; "**Integratif**" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan; dan "**Spasial**" adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Gambar 2.2
Metode Analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)
Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Lingkup substantif suatu tematik dalam kegiatan ini, dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yang saling terkait satu sama lainnya (baik secara vertikal maupun horizontal), yaitu (1) **ketersediaan**, digunakan untuk menganalisis ketersediaan layanan suatu tematik; (2) **aksesibilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses, memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (3) **keterjangkauan**, dipergunakan untuk menganalisis keterjangkauan masyarakat dari sisi biaya dalam rangka memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (4) **keberlanjutan**, digunakan untuk menganalisis jaminan keberlanjutan terhadap layanan suatu tematik; dan (5) **stabilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat resiko bencana yang dapat menyebabkan terhentinya layanan suatu tematik. Selanjutnya penerapan metode analisis melalui pendekatan THIS ini, sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.2 tersebut diatas, secara ilustratif diuraikan sebagai berikut:

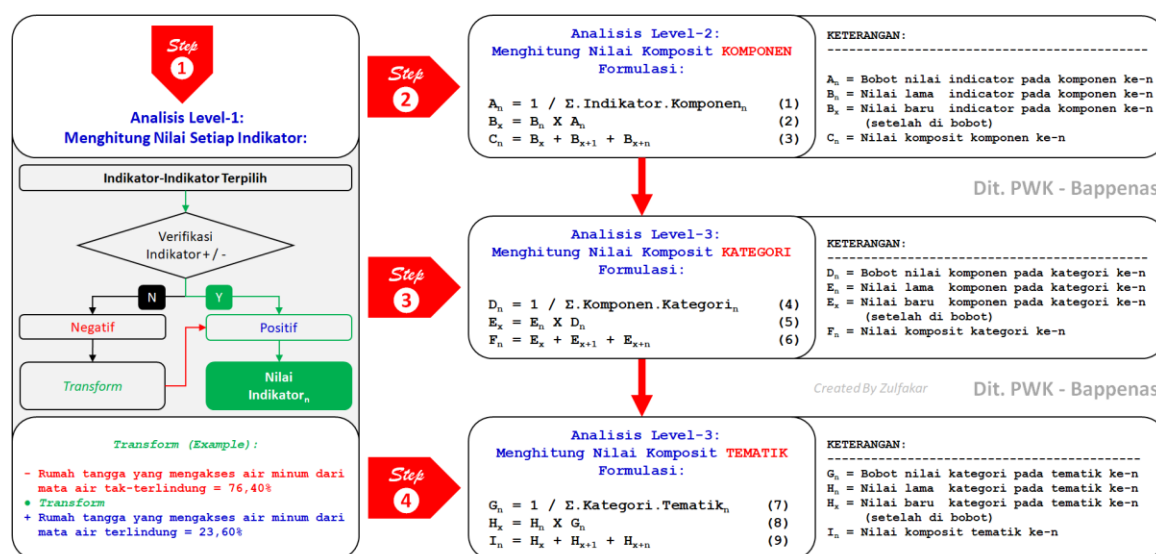
- **Analisis Tematik (Subject)**

Tematik dalam kegiatan ini difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

- **Analisis Holistik (*Technocratic Planning*),**

Analisis holistik (*technocratic planning*), merupakan metode analisis hulu-hilir (komprehensif) yang secara **vertical** dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, mulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis holistik ini disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Formulasi Analisis Holistik (*Technocratic Planning*)
Penyusunan PrADa



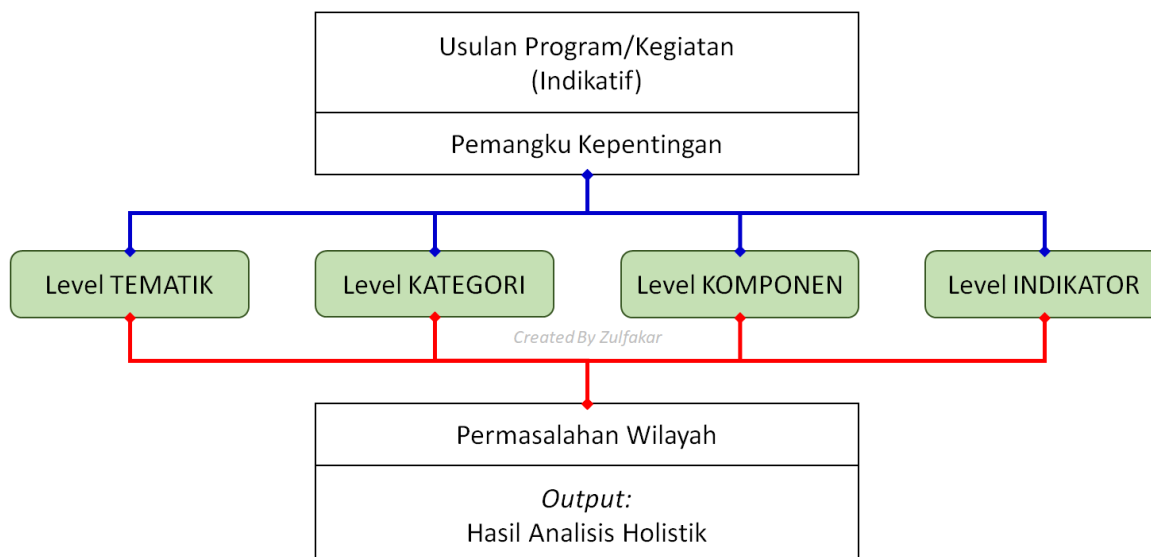
Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- **Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)**

Analisis integratif (*coordination/who's doing what*), merupakan metode analisis yang secara **horizontal** digunakan untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, disertai dengan pemetaan peran dari para pemangku kepentingan dan pendanaannya (*optional*), mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik.

Dalam menerapkan analisis integratif ini terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan analisis holistik. Hasil analisis holistik inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut dan peran para pemangku kepentingan sesuai tingkat permasalahannya, mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis integratif ini disajikan pada gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.4
Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)
Penyusunan PrADa

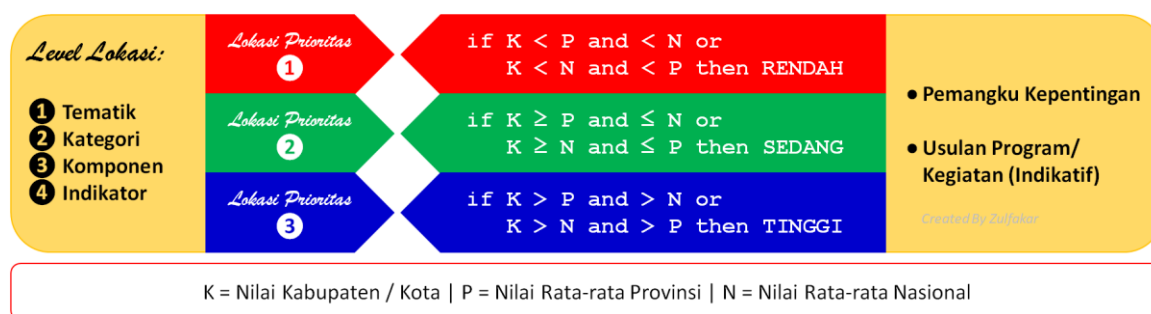


Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

● Analisis Spasial (*Spatially Bound*)

Analisis spasial (*spatially bound*) merupakan metode analisis yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi prioritas, yang akan terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu daerah dengan tingkat capaian rendah, sedang dan tinggi. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis spasial ini disajikan pada Gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5
Analisis Spasial (*Spatially Bound*) Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Bab-3

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL

Provinsi Papua



3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua ²

Untuk keseluruhan tahun 2017, ekonomi provinsi Papua tumbuh sebesar 4,64%, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan pada tahun 2016 yang mencapai 9,14%. Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor luar negeri provinsi Papua pada tahun 2017 mengalami kontraksi sebesar -5,49%, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang tumbuh mencapai 6,74%. Hal tersebut sejalan dengan kurang optimalnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Papua pada tahun 2017 sebesar 5,43% melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,84%. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya perekonomian secara keseluruhan sehingga menahan permintaan dan optimisme masyarakat.

Indikator	2016				2016				2017			
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	(0.72)	(5.17)	20.44	21.41	9.21	3.36	4.91	3.40	4.78	4.64		
Menurut Penggunaan												
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.56	6.54	6.17	5.14	5.84	5.16	6.55	7.53	5.69	5.43		
Pengeluaran Konsumsi LNPR	8.24	5.56	5.39	6.93	6.52	7.07	9.17	9.69	13.54	9.95		
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.61	5.31	0.92	0.05	2.08	0.13	1.37	7.70	6.86	4.20		
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.75	6.78	5.37	7.01	6.47	6.78	5.78	4.69	5.06	5.41		
Perubahan Inventori	89.81	5.11	84.62	448.18	23.51	(408.68)	(643.38)	4,913.50	(2,767.70)	(75.25)		
Ekspor Luar Negeri	(2.27)	(38.88)	(3.05)	96.07	6.74	(8.78)	50.78	(44.45)	2.51	(5.49)		
Impor Luar Negeri	(4.59)	35.79	(12.55)	3.16	4.64	(26.48)	(41.30)	(32.84)	(40.07)	(36.03)		
Net Ekspor Antar Daerah	(281.23)	(16.02)	(189.40)	167.61	(488.92)	78.35	(675.39)	(10.23)	74.65	(47.85)		
Menurut Kategori Lapangan Usaha												
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.18	3.69	0.02	2.05	2.21	1.35	1.83	2.93	5.71	3.98		
Pertambangan dan Penggalian	(10.50)	(20.80)	40.77	44.50	13.15	0.36	6.75	2.67	3.28	3.90		
Industri Pengolahan	6.98	1.12	4.94	5.15	4.51	4.56	6.55	6.07	7.81	6.46		
Pengadaan Listrik, Gas	27.14	12.81	8.53	1.86	11.86	1.21	0.94	8.14	6.45	4.11		
Pengadaan Air	3.70	3.77	2.59	3.45	3.37	4.96	5.13	6.77	8.57	6.38		
Konstruksi	4.71	7.00	12.13	10.93	8.81	9.42	3.84	2.99	5.99	5.18		
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.54	6.96	9.51	8.39	6.91	5.32	5.46	5.69	6.56	6.24		
Transportasi dan Pergudangan	4.30	8.08	9.73	10.08	8.13	4.97	5.32	5.52	5.84	5.98		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.09	8.15	6.83	6.09	6.54	5.35	5.91	6.20	6.61	6.04		
Informasi dan Komunikasi	6.28	2.95	4.18	0.64	3.42	6.59	5.32	6.92	9.04	6.99		
Jasa Keuangan	3.60	16.39	(0.01)	6.03	6.08	2.79	5.00	0.89	1.02	2.61		
Real Estate	5.42	5.86	8.30	8.35	7.02	3.83	4.41	6.06	6.26	5.60		
Jasa Perusahaan	5.80	6.20	5.42	5.37	5.68	5.43	5.39	5.56	6.62	5.77		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.91	10.86	9.88	4.98	9.64	4.42	1.86	1.82	5.78	4.36		
Jasa Pendidikan	6.24	10.66	9.48	5.20	7.83	4.93	5.01	5.01	5.62	5.55		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.91	13.05	10.35	3.60	8.08	4.64	4.73	4.15	6.32	5.20		
Jasa lainnya	6.06	9.19	7.03	3.83	6.43	4.30	5.22	6.38	6.44	5.62		
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (% yoy)	4.92	5.18	5.01	4.94	5.02	5.01	5.01	5.06	5.19	5.07		
Inflasi Papua (% yoy)	3.76	5.23	4.72	3.26	3.26	3.89	3.10	1.43	2.11	2.11		
Kota												
Jayapura	3.81	5.24	4.21	4.13	4.13	3.16	2.58	1.73	2.41	2.41		
Merauke	3.62	5.19	6.14	0.83	0.83	5.93	4.58	0.57	1.25	1.25		
Disagregasi Komponen												
Inflasi Inti (Core Inflation)	4.49	4.47	5.70	4.00	3.50	3.11	2.76	2.12	2.31	2.31		
Harga Pangan Bergejolak (Volatile Food)	0.66	3.58	11.60	8.13	1.86	5.92	(1.68)	(1.70)	(2.05)	(2.05)		
Harga Yang Diatur Pemerintah (Administered Prices)	6.81	10.99	11.60	5.76	6.24	3.69	10.46	3.86	7.04	7.04		
Kelompok Komoditas												
Bahan Makanan	4.78	8.36	6.84	2.68	2.68	6.58	(0.41)	(1.16)	(1.36)	(1.36)		
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	4.62	4.35	6.74	7.10	7.10	6.47	6.17	3.75	4.24	4.24		
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	2.53	1.67	2.80	2.26	2.26	3.18	4.35	3.49	3.26	3.26		
Sandang	2.43	3.14	3.05	1.03	1.03	1.86	0.95	0.60	1.19	1.19		
Kesehatan	4.19	3.29	3.06	2.29	2.29	1.41	1.32	0.67	0.87	0.87		
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2.63	2.62	0.78	0.59	0.59	1.64	1.81	2.48	2.50	2.50		
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	4.20	8.66	5.73	6.67	6.67	1.72	6.11	1.07	4.15	4.15		

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan kinerja perekonomian provinsi Papua pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh belum optimalnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Untuk keseluruhan tahun 2017, tercatat pertumbuhan lapangan usaha pertambangan sebesar 3,90%, lebih rendah dibanding pertumbuhan selama tahun 2016 yang mencapai 13,10%. Perundingan divestasi saham dan pengalihan izin usaha yang belum menemui kesepakatan serta aksi demonstrasi pekerja yang terjadi pada 2017 berdampak pada penurunan kinerja produksi pertambangan. Selain itu, kinerja lapangan usaha konstruksi selama 2017 juga mengalami perlambatan dibanding kinerja 2016, dari 8,81% menjadi 5,18%. Penyelesaian beberapa proyek infrastruktur pada 2017 menjadi salah satu penyebab perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi.

² Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

Selanjutnya, kinerja lapangan usaha pertambangan pada triwulan IV 2017 tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan III 2017. Tercatat pertumbuhan lapangan usaha pertambangan pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 3,28% lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang mencapai 2,68%.

Kenaikan kinerja pada periode tersebut sejalan dengan produksi yang berjalan lancar dengan kendala yang relatif minimal dan dapat terkelola dengan baik. Selain itu, izin ekspor konsentrat yang kembali dibuka pada Oktober 2017 hingga Februari 2018 mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan penjualan. Volume produksi konsentrat tembaga pada triwulan laporan mencapai 337 juta pound, lebih tinggi dari triwulan III 2017 yang mencapai 293 juta pound. Sementara, volume produksi emas pada triwulan IV 2017 mencapai 413 ribu ounce, relatif stabil jika dibandingkan dengan produksi emas pada triwulan III 2017 yang sebesar 412 ribu ounce.

Dari sisi penjualan, konsentrat tembaga mengalami kontraksi penjualan sebesar 0,28%, relatif tidak sedalam kontraksi triwulan III 2017 yang sebesar -22,29%. Sementara itu, penjualan konsentrat emas masih terjaga positif dengan angka pertumbuhan sebesar 45,64%. Informasi resmi dari perusahaan tambang dominan di Papua, hal tersebut salah satunya dikarenakan kualitas kandungan bijih (ore) emas yang lebih baik dibanding tembaga pada periode yang sama dan bijih (ore) emas pada periode tahun sebelumnya.

Untuk keseluruhan tahun 2017, kinerja lapangan usaha pertambangan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016. Tercatat pertumbuhan lapangan usaha pertambangan sebesar 3,90% pada tahun 2017, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 13,10%.

Dari sisi produksi, terdapat tiga faktor yang menyebabkan perlambatan tersebut, yaitu pelarangan izin ekspor konsentrat tembaga di triwulan I 2017, aksi unjuk rasa karyawan yang terjadi pada triwulan II 2017, dan kendala operasional smelter di Gresik yang disebabkan juga oleh aksi unjuk rasa karyawan selama hampir 2 bulan sejak awal tahun 2017.

Sementara dari sisi penjualan, kualitas bijih (ore) konsentrat tembaga yang lebih tinggi dibanding tahun 2016 menjadi salah satu faktor penahan penurunan kinerja lapangan usaha pertambangan. Rilis resmi dari perusahaan tambang terbesar di Papua menyatakan bahwa rata-rata kualitas ore tembaga pada tahun 2017 sebesar 1,01%, lebih tinggi dari tahun 2016 yang sebesar 0,91%. Kondisi serupa juga terlihat pada ore

3.2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan provinsi Papua periode Maret 2017, lebih tinggi dari nasional, yaitu sebesar 27,62% dan nasional 10,64%. Sementara itu, untuk tingkat kemiskinan kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua disajikan sebagai berikut:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Periode Maret 2017						
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional						
NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Index Kedalaman Kemiskinan (P1)	Index Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
01.	Deiyai	31.33	43.63	11.63	4.33	556,281.00
02.	Intan Jaya	20.29	42.23	13.18	5.58	598,436.00
03.	Lanny Jaya	69.78	39.60	12.12	4.93	446,061.00
04.	Yahukimo	73.27	39.33	9.42	3.12	338,613.00
05.	Jayawijaya	81.94	38.62	14.58	6.81	406,219.00
06.	Puncak	40.17	37.46	8.87	3.28	602,481.00
07.	Paniai	63.38	37.40	10.04	3.41	461,606.00
08.	Supiori	7.09	37.40	8.59	3.08	429,102.00
09.	Nduga *	36.07	37.29	7.66	2.30	327,233.00
10.	Mamberamo Tengah	17.20	36.38	6.73	1.96	370,978.00
11.	Puncak Jaya	44.16	36.01	6.93	2.07	581,537.00
12.	Yalimo	21.18	34.97	11.47	4.55	316,059.00
13.	Tolikara	44.47	32.73	4.69	1.05	252,132.00
14.	Waropen	9.03	30.82	12.27	6.03	627,112.00
15.	Pegunungan Bintang	22.41	30.60	7.85	2.89	455,819.00
16.	Dogiyai	28.75	30.36	4.84	1.22	471,762.00
17.	Mamberamo Raya	6.63	29.88	2.17	0.28	658,412.00
18.	Asmat	25.05	27.16	3.94	0.84	349,487.00
19.	Kepulauan Yapen	25.35	26.82	6.11	1.95	592,535.00
20.	Mappi	24.31	25.75	3.86	0.93	300,400.00
21.	Biak Numfor	36.63	25.44	6.63	2.25	521,782.00
22.	Nabire	36.68	25.38	10.99	5.57	575,361.00
23.	Boven Digoel	13.10	19.90	3.32	0.93	444,813.00
24.	Keerom	9.14	16.69	3.97	1.61	532,499.00
25.	Mimika	31.15	14.89	4.54	2.36	684,282.00
26.	Sarmi	5.23	13.75	2.74	0.92	421,484.00
27.	Jayapura	16.31	13.01	2.35	0.69	489,932.00
28.	Kota Jayapura	33.51	11.46	3.20	1.25	849,496.00
29.	Merauke	24.06	10.81	2.11	0.55	342,842.00
PAPUA		897.69	27.62	7.50	2.82	457,541.00
INDONESIA		7,771.00	10.64	1.83	0.48	361,496.00
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di ATAS provinsi dan nasional.						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di BAWAH provinsi, akan tetapi berada di ATAS nasional.						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di BAWAH provinsi dan nasional.						

3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia provinsi Papua pada tahun 2016 menempati urutan ke 34 dari 34 provinsi, dengan nilai IPM sebesar 58,05 atau lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 70,18. Sementara itu, untuk indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua disajikan sebagai berikut:

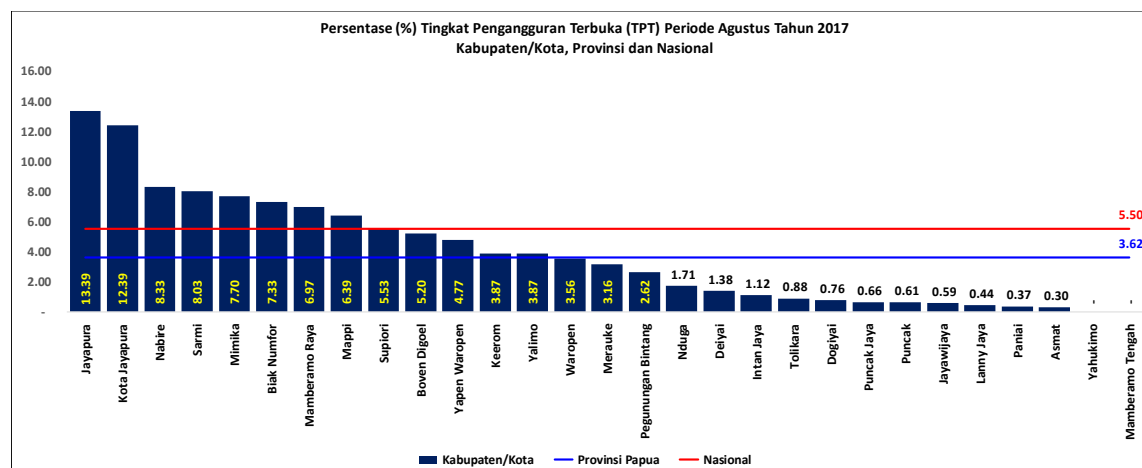
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Tahun 2016							
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional							
NO.	Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (Ribu Rp/Tahun)	IPM	Pertumbuhan (Persen)
01.	Nduga	54.50	2.34	0.70	3,725.00	26.56	4.27
02.	Puncak	65.10	4.48	1.78	5,181.00	39.96	1.38
03.	Pegunungan Bintang	63.84	5.12	2.19	5,289.00	41.90	2.41
04.	Mamberamo Tengah	62.82	7.66	2.57	4,219.00	44.15	1.38
05.	Intan Jaya	65.04	6.52	2.49	5,038.00	44.82	1.05
06.	Yalimo	64.90	7.82	2.19	4,435.00	44.95	1.41
07.	Lanny Jaya	65.63	7.50	2.92	4,106.00	45.16	2.21
08.	Puncak Jaya	64.29	5.99	3.38	5,089.00	45.49	1.39
09.	Tolikara	64.98	7.69	3.21	4,711.00	47.11	1.57
10.	Yahukimo	65.19	7.54	3.99	4,248.00	47.13	1.08
11.	Asmat	55.90	7.79	4.48	5,601.00	47.31	1.49
12.	Deiyai	64.55	9.77	2.97	4,383.00	48.50	0.46
13.	Mamberamo Raya	56.74	10.80	4.89	4,387.00	49.00	1.47
14.	Dogiyai	64.99	9.87	4.89	5,190.00	53.32	1.03
15.	Paniai	65.58	10.32	3.77	6,191.00	54.34	0.25
16.	Jayawijaya	58.48	11.01	4.74	7,282.00	54.96	1.44
17.	Mappi	64.16	10.47	5.98	5,951.00	56.54	0.77
18.	Boven Digoel	58.51	10.97	7.82	7,770.00	59.35	0.55
19.	Supiori	65.29	12.70	8.13	5,379.00	60.59	0.83
20.	Sarmi	65.76	11.09	8.08	6,417.00	61.27	0.46
21.	Waropen	65.77	12.60	8.66	6,270.00	63.10	1.20
22.	Keerom	66.13	11.62	7.24	8,671.00	64.10	1.05
23.	Kepulauan Yapen	68.69	11.62	8.81	7,414.00	65.55	0.41
24.	Nabire	67.50	10.66	9.48	8,779.00	66.64	0.23
25.	Merauke	66.53	12.71	8.26	10,016.00	68.09	0.50
26.	Jayapura	66.40	14.15	9.53	9,653.00	70.50	0.65
27.	Biak Numfor	67.86	13.68	9.84	9,647.00	71.13	0.39
28.	Mimika	71.90	11.11	9.53	11,169.00	71.64	1.06
29.	Kota Jayapura	69.99	14.61	11.14	14,319.00	78.56	0.66
PAPUA		65.12	10.23	6.15	6,637.00	58.05	1.40
INDONESIA		70.90	12.72	7.95	104,201.00	70.18	0.91

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di BAWAH provinsi DAN nasional.
	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di ATAS provinsi, akan tetapi berada di BAWAH nasional.
	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di ATAS provinsi DAN nasional.

3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka provinsi Papua periode Agustus 2017, lebih rendah dari nasional, yaitu sebesar 3,62% dan nasional 5,50%. Sementara itu, untuk tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua disajikan sebagai berikut:



Bab-4

PrADa

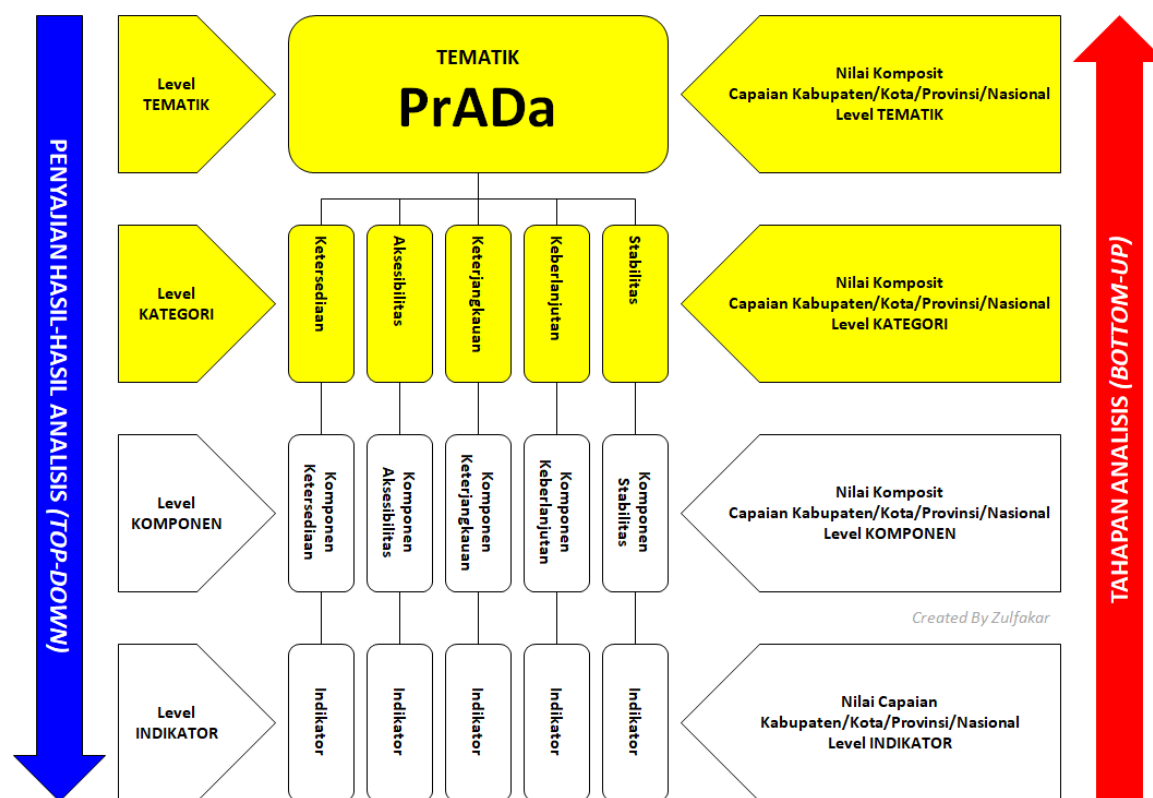
Provinsi Papua



Model analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini dilakukan melalui pendekatan metode analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematiknya adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, infrastruktur, ketahanan energi, industri dan pariwisata.

Holistik (*technoratic planning*) terbagi ke dalam 4 level analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dimulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik (*bottom-up*). Integratif (*coordination/who's doing what*) untuk memetakan peran para pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Swasta) termasuk merumuskan program/kegiatan (indikatif), mulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik. Spasial (*spatially bound*) untuk memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat capaian terhadap indikator, komponen, kategori dan tematik rendah, sedang atau tinggi.

Gambar 4.1
Struktur dan Lingkup Penyajian Hasil Analisis
Penyusunan PrADa



Mengacu kepada Gambar 4.1 tersebut di atas, terlihat bahwa kalau dalam proses analisis menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), yang dimulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik, maka dalam penyajian hasil analisis justru sebaliknya, yaitu menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dimulai dari level tematik sampai dengan level kategori.

Analisis level tematik, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit suatu tematik dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit suatu tematik berasal dari 5 (lima) unsur kategori pembentuknya yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keterjangkauan, (4) keberlanjutan, dan (5) stabilitas.

Sementara itu, analisis level kategori, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit kategori dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit setiap kategori berasal dari masing-masing unsur komponen pembentuknya.

Adapun, dalam menentukan kabupaten/kota memiliki nilai komposit dengan tingkat capaian suatu tematik/kategori RENDAH, SEDANG dan TINGGI, ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota RENDAH**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih kecil dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih kecil dari nilai nasional DAN lebih kecil dari nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota SEDANG**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai provinsi DAN lebih kecil atau sama dengan nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai nasional DAN lebih kecil atau sama dengan nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota TINGGI**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar dari nilai nasional DAN lebih besar dari nilai provinsi.

4.1

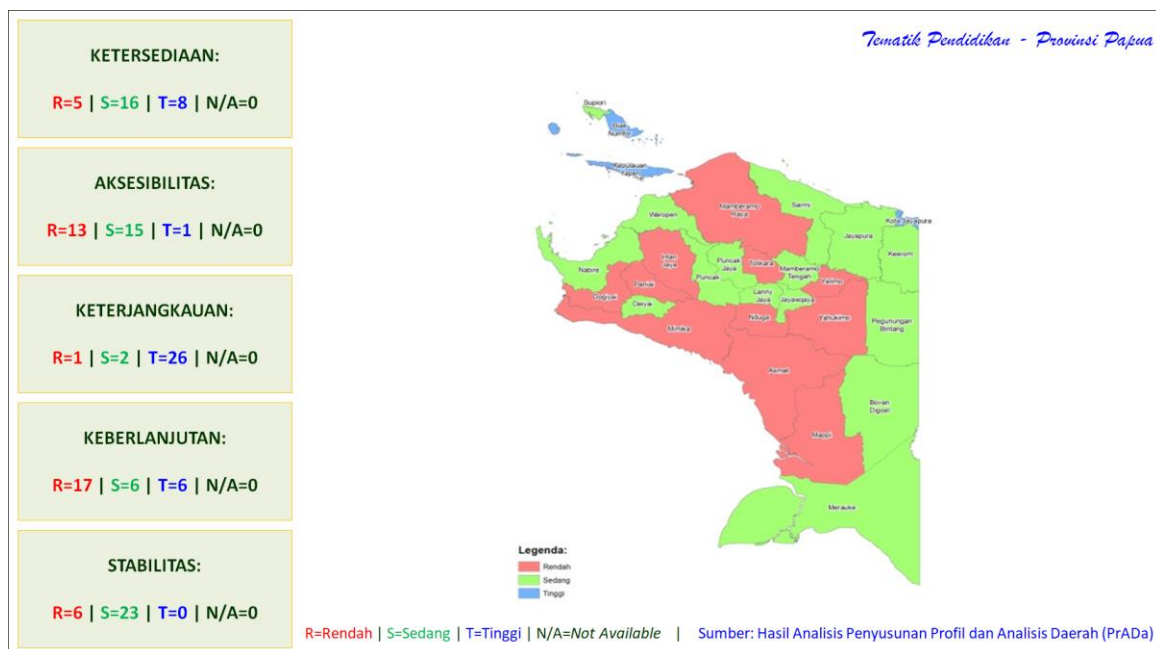
*Tematik:***Pendidikan**

Provinsi Papua



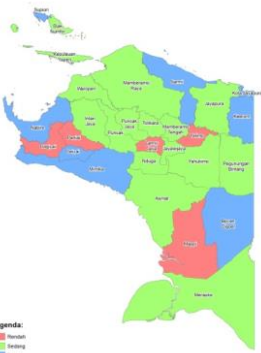
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Pendidikan Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
Ketersediaan	- Murid - Guru - Sekolah	- Rasio siswa/rombel SD; - Rasio siswa/rombel SMP; - Rasio siswa/rombel SMA; - Rasio rombel/ruang kelas SD; - Rasio rombel /ruang kelas SMP; - Rasio rombel /ruang kelas SMA; - Rasio siswa/guru SD; - Rasio siswa/guru SMP; - Rasio siswa/guru SMA. - Presentase guru SD kualifikasi; - Presentase guru SMP kualifikasi; - Presentase guru SMA kualifikasi. - Presentase kerusakan ruang kelas SD; - Presentase kerusakan ruang kelas SMP; - Presentase kerusakan ruang kelas SMA.
Aksesibilitas	- Jarak layanan - Infrastruktur	- Rata-rata jarak SD/SMP/SMA; - Desa beraspal.
Keterjangkauan	Blaya	Rata-rata pengeluaran keluarga untuk pendidikan per bulan.
Keberlanjutan	Layanan pendidikan	Angka Partisipasi Murid SD/SMP/SMA;
Stabilitas	Resiko bencana	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Pendidikan Provinsi Papua

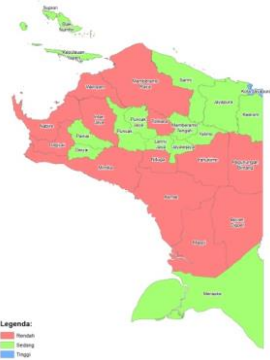


No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pendidikan
01.	MemberamoRaya	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF SEDANG HINGGA RENDAH RENDAH : 11 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 15 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA
02.	Mimika			
03.	Dogiyai			
04.	Mappi			
05.	Asmat			
06.	IntanJaya			
07.	Nduga			
08.	Tolikara			
09.	Yahukimo			
10.	Paniai			
11.	Yalimo			
12.	Sarmi	Sedang	Prioritas 2	
13.	Merauke			
14.	Nabire			
15.	Jayapura			
16.	MembramoTengah			
17.	Puncak			
18.	PuncakJaya			
19.	Deiyai			
20.	Keerom			
21.	Supiori			
22.	PegununganBintang	Tinggi	Prioritas 3	
23.	Waropen			
24.	BovenDigoel			
25.	LannyJaya			
26.	JayaWijaya			
27.	KotaJayapura			
28.	BiakNumfor			
29.	KepulauanYapen			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

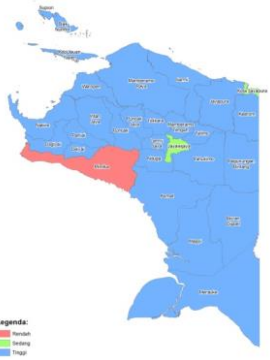
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan
01. 02. 03. 04. 05.	Dogiyai Mappi Paniai Yalimo LannyJaya	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Masih terbatasnya jumlah ruang kelas di beberapa kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk seluruh rombongan belajar; - Tingkat kerusakan ruang kelas relatif tinggi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; - Rasio siswa/guru relatif masih belum mencukupi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di beberapa kabupaten/kota; - Kualifikasi guru minimal sarjana relatif sudah mencukupi, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Pendidikan dasar dan menengah; - Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan: - Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); - Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); - Rehabilitasi ruang belajar; - Renovasi sekolah; - Perekrutan guru PNS; - Pemberian beasiswa bagi guru; - Sertifikasi guru; - Peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kemen PAN RB; - Pemerintah Daerah.
06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	MemberamoRaya Merauke Jayapura Asmat IntanJaya Nduga Tolikara Yahukimo MembramoTengah Puncak PuncakJaya PegununganBintang Waropen JayaWijaya BiakNumfor KepulauanYapen	Sedang	Prioritas 2	
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	Sarmi KotaJayapura Nabire Mimika Deiyai Keerom Supiori BovenDigoel	Tinggi	Prioritas 3	
				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				
Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)				

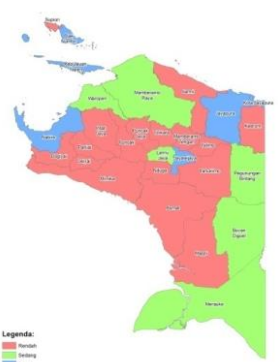
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan	
01.	MemberamoRaya	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: ● Jarak dari desa ke sekolah, di beberapa kabupaten/kota masih relatif jauh. ● Minimnya kondisi jalan desa yang beraspal. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): ● Program: - Pendidikan dasar dan menengah; - Pembangunan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. ● Kegiatan: - Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di setiap desa/kelurahan; - Pembangunan dan perbaikan jalan desa; ● Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Daerah.	
02.	Nabire				
03.	Mimika				
04.	Dogiyai				
05.	Mappi				
06.	Asmat				
07.	IntanJaya				
08.	Nduga				
09.	Tolikara				
10.	Yahukimo				
11.	PegununganBintang				
12.	Waropen				
13.	BovenDigoel				
14.	Sarmi	Sedang	Prioritas 2		
15.	Merauke				
16.	Jayapura				
17.	Paniai				
18.	Yalimo				
19.	MembramoTengah				
20.	Puncak				
21.	PuncakJaya				
22.	Deiyai				
23.	Keerom				
24.	Supiori				
25.	LannyJaya				
26.	JayaWijaya				
27.	BiakNumfor				
28.	KepulauanYapen				
29.	KotaJayapura	Tinggi	Prioritas 3		
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)	

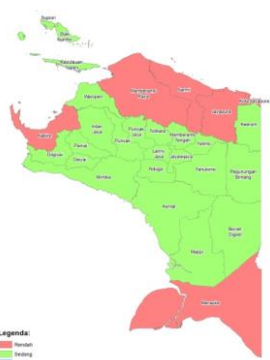
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan
01.	Mimika	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Rata-rata biaya pendidikan relatif dapat terjangkau di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, walaupun demikian di beberapa kabupaten/kota biaya pendidikan masih relatif tinggi. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Pendidikan dasar dan menengah; • Kegiatan: - Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); - Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). • Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Pemerintah Daerah.
02.	KotaJayapura	Sedang	Prioritas 2	
03.	JayaWijaya	Sedang	Prioritas 2	
04.	Sarmi	Tinggi	Prioritas 3	
05.	MemberamoRaya			
06.	Merauke			
07.	Nabire			
08.	Jayapura			
09.	Dogiyai			
10.	Mappi			
11.	Asmat			
12.	IntanJaya			
13.	Nduga			
14.	Tolikara			
15.	Yahukimo			
16.	Paniai			
17.	Yalimo			
18.	MembramoTengah			
19.	Puncak			
20.	PuncakJaya			
21.	Deiyai			
22.	Keerom			
23.	Supiori			
24.	PegununganBintang			
25.	Waropen			
26.	BovenDigoel			
27.	LannyJaya			
28.	BiakNumfor			
29.	KepulauanYapen			
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Sarmi Mimika Dogiyai Mappi Asmat IntanJaya Nduga Tolikara Yahukimo Paniai Yalimo MembramoTengah Puncak PuncakJaya Deiyai Keerom Supiori	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Masih tingginya jumlah siswa usia sekolah yang harusnya bersekolah di beberapa kabupaten/kota, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan: - Peningkatan proporsi anggaran pendidikan dasar dan menengah; - Peningkatan layanan pendidikan. Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Pemerintah Daerah.
18. 19. 20. 21. 22. 23.	MemberamoRaya Merauke PegununganBintang Waropen BovenDigoel LannyJaya	Sedang	Prioritas 2	
24. 25. 26. 27. 28. 29.	KotaJayapura Nabire Jayapura JayaWijaya BiakNumfor KepulauanYapen	Tinggi	Prioritas 3	
				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan
01.	Sarmi	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Mitigasi bencana. Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Memberamo Raya			
03.	Merauke			
04.	Kota Jayapura			
05.	Nabire			
06.	Jayapura			
07.	Mimika	Sedang	Prioritas 2	
08.	Dogiyai			
09.	Mappi			
10.	Asmat			
11.	IntanJaya			
12.	Nduga			
13.	Tolikara			
14.	Yahukimo			
15.	Paniai			
16.	Yalimo			
17.	Membramo Tengah			
18.	Puncak			
19.	Puncak Jaya			
20.	Deiyai			
21.	Keerom			
22.	Supiori			
23.	Pegunungan Bintang			
24.	Waropen			
25.	BovenDigoel			
26.	LannyJaya			
27.	JayaWijaya			
28.	BiakNumfor			
29.	Kab.Kepulauan Yapen			
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.2

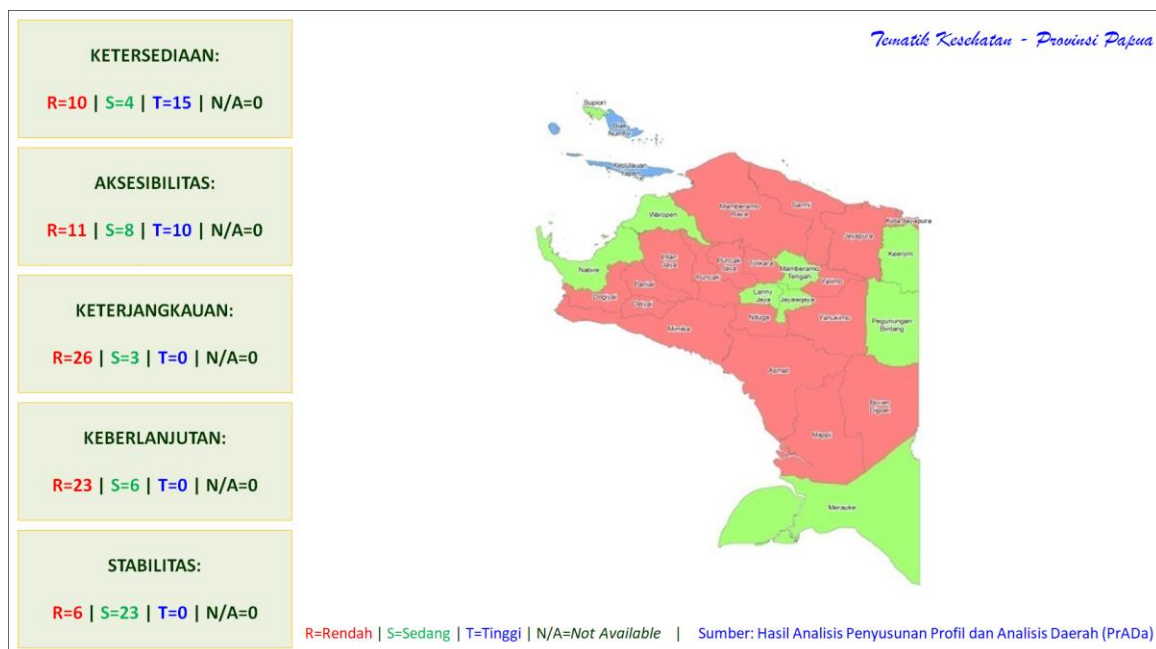
*Tematik:***Kesehatan**

Provinsi Papua



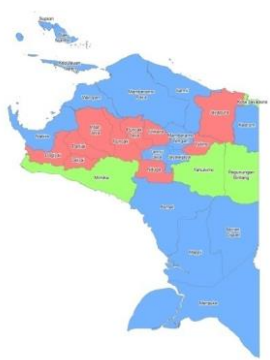
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Kesehatan Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
Ketersediaan	- Tenaga Kesehatan - Sarana Kesehatan	- Rasio bidan per 100.000 penduduk; - Rasio dokter per 100.000 penduduk; - Rasio tenaga kesehatan lain per 100.000 penduduk. - Rasio posyandu per 3.000 penduduk; - Rasio puskesmas per 120.000 penduduk; - Rasio puskesmas pembantu per 3.000 penduduk; - Rasio rumah sakit per 240.000 penduduk.
Aksesibilitas	Kedekatan dengan fasilitas kesehatan terdekat	- Jarak ke puskesmas rawat inap; - Jarak ke puskesmas tanpa rawat inap; - Jarak ke puskesmas pembantu; - Jarak ke rumah sakit; - Jarak ke puskesmas praktik dokter.
Keterjangkauan	Kepemilikan BPJS kesehatan	Presentase kepemilikan BPJS kesehatan.
Keberlanjutan	Penunjang ketersediaan tenaga kesehatan pada masa mendatang	Keberadaan perguruan tinggi di daerah yang memiliki jurusan dibidang kesehatan.
Stabilitas	Resiko bencana	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Kesehatan Provinsi Papua

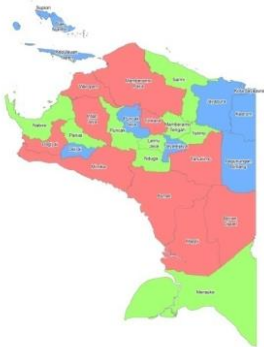


No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Kesehatan
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF RENDAH RENDAH : 18 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 9 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA
02.	Boven Digoel			
03.	Deiyai			
04.	Dogiyai			
05.	Intan Jaya			
06.	Jayapura			
07.	Kota Jayapura			
08.	Mamberamo Raya			
09.	Mappi			
10.	Mimika			
11.	Nduga			
12.	Paniai			
13.	Puncak			
14.	Puncak Jaya			
15.	Sarmi			
16.	Tolikara			
17.	Yahukimo			
18.	Yalimo			
19.	Jayawijaya	Sedang	Prioritas 2	
20.	Keerom			
21.	Lanny Jaya			
22.	Mamberamo Tengah			
23.	Merauke			
24.	Nabire			
25.	Pegunungan Bintang			
26.	Supiori			
27.	Waropen			
28.	Biak Numfor	Tinggi	Prioritas 3	
29.	Kepulauan Yapen			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.	Deiyai Dogiyai Intan Jaya Jayapura Nduga Paniai Puncak Puncak Jaya Tolikara Yalimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Terbatasnya jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan; • Belum meratanya penempatan dokter; • Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil; • Masih minimnya, kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Peningkatan pelayanan kesehatan. • Kegiatan: - Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan; - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan jaringannya. • Pelaksana: - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah.
11. 12. 13. 14.	Kota Jayapura Mimika Pegunungan Bintang Yahukimo	Sedang	Prioritas 2	
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	Asmat Biak Numfor Boven Digoel Jayawijaya Keerom Kepulauan Yapen Lanny Jaya Mamberamo Tengah Mamberamo Raya Mappi Merauke Nabire Sarmi Supiori Waropen	Tinggi	Prioritas 3	
				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

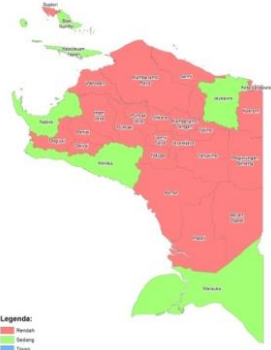
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.	Asmat Boven Digoel Dogiyai Intan Jaya Mamberamo Raya Mappi Mimika Tolikara Waropen Yahukimo Lanny Jaya	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Terbatasnya infrastruktur pendukung untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan; ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Pembangunan infrastruktur pendukung. • Kegiatan: - Peningkatan pembangunan infrastruktur; • Pelaksana: - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Pemerintah Daerah.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Mamberamo Tengah Merauke Nabire Nduga Paniai Puncak Sarmi Yalimo	Sedang	Prioritas 2	
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	Biak Numfor Deiyai Jayapura Jayawijaya Keerom Kepulauan Yapen Kota Jayapura Pegunungan Bintang Puncak Jaya Supiori	Tinggi	Prioritas 3	
				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Terbatasnya kepemilikan BPJS kesehatan. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Sosialisasi BPJS kesehatan. • Kegiatan: - Peningkatan pelayanan BPJS kesehatan. • Pelaksana: - Kementerian Kesehatan; - Pemerintah Daerah.
02.	Boven Digoel			
03.	Deiyai			
04.	Dogiyai			
05.	Intan Jaya			
06.	Jayapura			
07.	Jayawijaya			
08.	Keerom			
09.	Kepulauan Yapen			
10.	Kota Jayapura			
11.	Lanny Jaya			
12.	Mamberamo Tengah			
13.	Mamberamo Raya			
14.	Mappi			
15.	Merauke			
16.	Mimika			
17.	Nduga			
18.	Paniai			
19.	Pegunungan Bintang			
20.	Puncak			
21.	Puncak Jaya			
22.	Sarmi			
23.	Supiori			
24.	Tolikara			
25.	Yahukimo			
26.	Yalimo			
27.	Biak Numfor	Sedang	Prioritas 2	
28.	Nabire			
29.	Waropen			
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.	Asmat Boven Digoel Deiyai Dogiyai Intan Jaya Jayawijaya Keerom Kota Jayapura Lanny Jaya Mamberamo Tengah Mamberamo Raya Mappi Nduga Paniai Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Sarmi Supiori Tolikara Waropen Yahukimo Yalimo	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: • Terbatasnya perguruan tinggi/akademi di daerah yang memiliki jurusan bidang kesehatan. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Peningkatan SDM kesehatan. • Kegiatan: - Penyediaan dan/atau peningkatan kuantitas dan kualitas jurusan bidang kesehatan pada perguruan tinggi/akademi di daerah. • Pelaksana: - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah.
24. 25. 26. 27. 28. 29.	Biak Numfor Jayapura Kepulauan Yapen Merauke Mimika Nabire	Sedang	Prioritas 2	
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan
01.	Jayapura	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: ● Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): ● Program: - Mitigasi bencana. ● Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. ● Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kota Jayapura			
03.	Mamberamo Raya			
04.	Merauke			
05.	Nabire			
06.	Sarmi			
07.	Asmat	Sedang	Prioritas 2	
08.	Biak Numfor			
09.	Boven Digoel			
10.	Deiyai			
11.	Dogiyai			
12.	IntanJaya			
13.	Jayawijaya			
14.	Keerom			
15.	Kepulauan Yapen			
16.	LannyJaya			
17.	Mamberamo Tengah			
18.	Mappi			
19.	Mimika			
20.	Nduga			
21.	Paniai			
22.	Pegunungan Bintang			
23.	Puncak			
24.	PuncakJaya			
25.	Supiori			
26.	Tolikara			
27.	Waropen			
28.	Yahukimo			
29.	Yalimo			
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.3

Tematik:

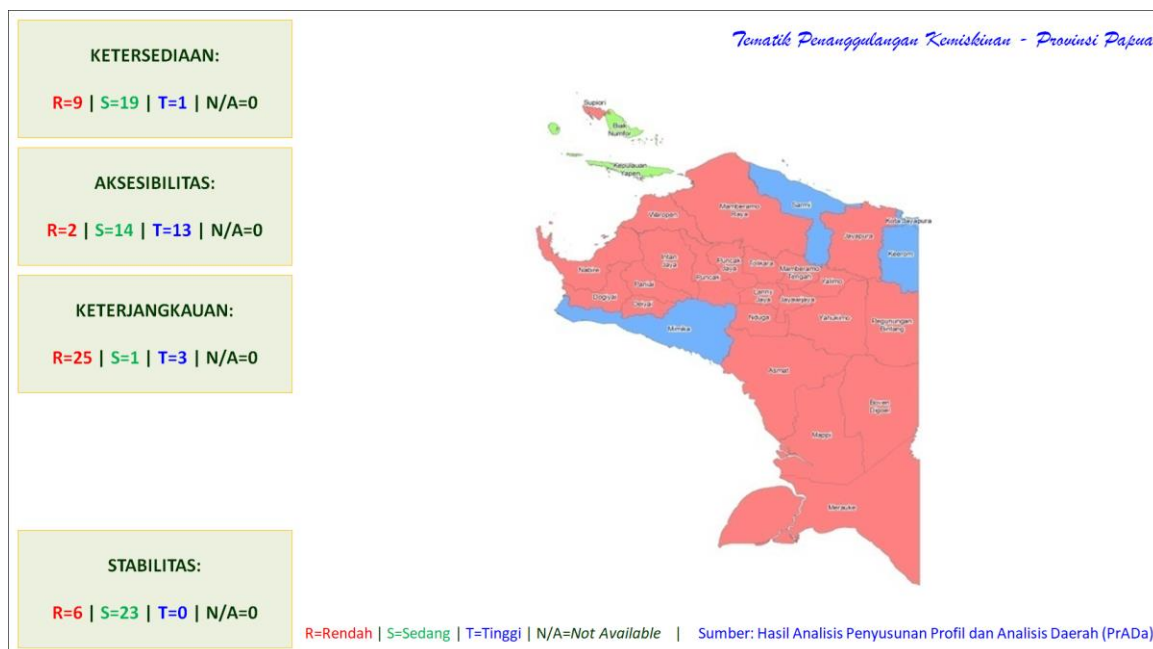
Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Papua



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
• Ketersediaan	• Penduduk miskin	• Presentase kemiskinan (P0); • Indeks kedalaman kemiskinan (P1); • Indeks keparahan kemiskinan (P2).
• Aksesibilitas	• Pelayanan dasar	• Presentase jumlah anak miskin yang bersekolah; • Presentase individu miskin yang memiliki penyakit kronis; • Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah milik sendiri atau kontrak/sewa; • Presentase RTM yang menggunakan air minum layak; • Presentase RTM yang menggunakan jamban sendiri/bersama; • Presentase RTM yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan non PLN); • Kondisi jalan mantab.
• Keterjangkauan	• Luas Layanan	• Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH); • Target PKH; • Presentase penerima PKH.
• Stabilitas	• Resiko bencana	• Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF RENDAH RENDAH : 23 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 2 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 4 KABUPATEN/KOTA	
02.	Boven Digoel				
03.	Deiyai				
04.	Dogiyai				
05.	Intan Jaya				
06.	Jaya Wijaya				
07.	Jayapura				
08.	Lanny Jaya				
09.	Mappi				
10.	Memberamo Raya				
11.	Membramo Tengah				
12.	Merauke				
13.	Nabire				
14.	Nduga				
15.	Paniai				
16.	Pegunungan Bintang				
17.	Puncak				
18.	Puncak Jaya				
19.	Supiori				
20.	Tolikara				
21.	Waropen				
22.	Yahukimo				
23.	Yalimo				
24.	Biak Numfor	Sedang	Prioritas 2		
25.	Kepulauan Yapen				
26.	Keerom	Tinggi	Prioritas 3		
27.	Mimika				
28.	Sarmi				
29.	Kota Jayapura				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)	

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.	Deiyai Intan Jaya Jaya Wijaya Lanny Jaya Paniai Supiori Waropen Yahukimo Yalimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Tingginya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di beberapa kabupaten/kota. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Pemberdayaan sosial; - Perlindungan dan jaminan sosial; - Penanganan fakir miskin. Kegiatan: - Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; - Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); - Perlindungan sosial korban bencana alam; - Perlindungan sosial korban bencana sosial; - Jaminan sosial keluarga; - Penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Pelaksana: - Kementerian Sosial; - Pemerintah Daerah.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	Asmat Biak Numfor Boven Digoel Dogiyai Jayapura Keerom Kepulauan Yapen Mappi Memberamo Raya Membramo Tengah Merauke Mimika Nabire Nduga Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Sarmi Tolikara	Sedang	Prioritas 2	
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan, di beberapa kabupaten/kota. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Pendidikan dasar dan menengah; - Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; - Pembinaan pelayanan kesehatan; - Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; - Pengembangan perumahan; - Peningkatan layanan ketenagalistrikan. Kegiatan: - Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); - Pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); - Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); - Pembangunan rumah susun; - Penyediaan sanitasi layak; - Peningkatan listrik desa. Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; - Pemerintah Daerah.
02.	Nduga			
03.	Boven Digoel	Sedang	Prioritas 2	
04.	Dogiyai			
05.	Intan Jaya			
06.	Jaya Wijaya			
07.	Lanny Jaya			
08.	Mappi			
09.	Membramo Tengah			
10.	Mimika			
11.	Pegunungan Bintang			
12.	Puncak			
13.	Puncak Jaya			
14.	Tolikara			
15.	Yahukimo			
16.	Yalimo			
17.	Biak Numfor	Tinggi	Prioritas 3	
18.	Deiyai			
19.	Jayapura			
20.	Keerom			
21.	Kepulauan Yapen			
22.	Memberamo Raya			
23.	Merauke			
24.	Nabire			
25.	Paniai			
26.	Sarmi			
27.	Supiori			
28.	Waropen			
29.	Jayapura			
				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Belum optimalnya penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Perlindungan dan jaminan sosial. • Kegiatan: - Peningkatan tata kelola program perlindungan dan jaminan sosial; - Peningkatan pengawasan pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial. • Pelaksana: - Kementerian Sosial; - Pemerintah Daerah.
02.	Biak Numfor			
03.	Boven Digoel			
04.	Deiyai			
05.	Dogiyai			
06.	Intan Jaya			
07.	Jaya Wijaya			
08.	Jayapura			
09.	Kepulauan Yapen			
10.	Lanny Jaya			
11.	Mappi			
12.	Memberamo Raya			
13.	Membramo Tengah			
14.	Merauke			
15.	Nabire			
16.	Nduga			
17.	Paniai			
18.	Pegunungan Bintang			
19.	Puncak			
20.	Puncak Jaya			
21.	Supiori			
22.	Tolikara			
23.	Waropen			
24.	Yahukimo			
25.	Yalimo			
26.	Keerom	Sedang	Prioritas 2	
27.	Mimika	Tinggi	Prioritas 3	
28.	Sarmi			
29.	Kota Jayapura			
				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01. 02. 03. 04. 05. 06.	Jayapura Mappi Merauke Nabire Sarmi Kota Jayapura	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: - Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Mitigasi bencana. Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	Asmat Biak Numfor Boven Digoel Deiyai Dogiyai Intan Jaya Jaya Wijaya Keerom Kepulauan Yapen Lanny Jaya Memberamo Raya Membramo Tengah Mimika Nduga Paniai Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Supiori Tolikara Waropen Yahukimo Yalimo	Sedang	Prioritas 2	
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.4

Tematik:

Perumahan dan Permukiman

Provinsi Papua

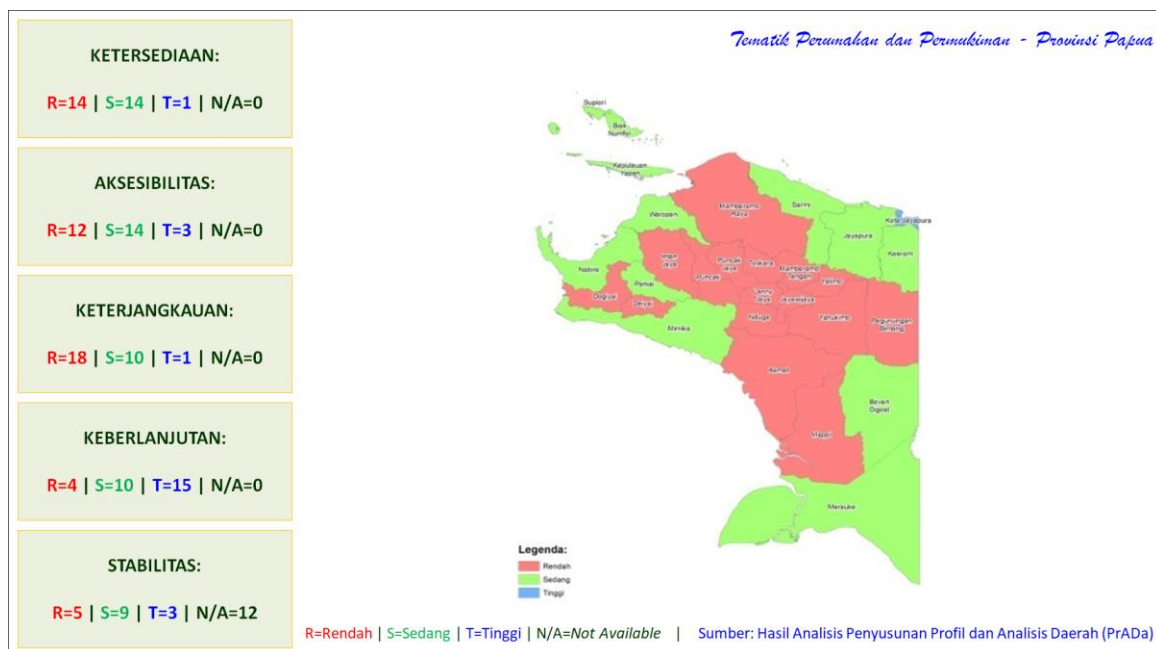


Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
• Ketersediaan	• Persampahan • Ruang publik • Angkutan umum • Telekomunikasi • Jasa ekspedisi • Pertokoan • Keamanan	• Tempat buang sampah sebagian besar keluarga; • Tempat penampungan sampah sementara (TPS). • Keberadaan ruang publik bagi warga untuk bersantai atau bermain tanpa perlu membayar. • Keberadaan angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Operasional angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Jam operasi angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan. • Keberadaan telepon koin dan kartu yang masih aktif atau berfungsi; • Keberadaan base transceiver station (BTS) atau menara telepon seluler; • Kondisi sinyal telepon seluler atau handphone. • Keberadaan warung internet (warnet) di desa atau kelurahan; • kantor pos, pos pembantu, rumah pos; • Keberadaan pelayanan pos keliling; • Keberadaan perusahaan jasa ekspedisi swasta. • Keberadaan kelompok pertokoan. • Keberadaan pos polisi termasuk kantor polisi.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
Aksesibilitas	- Akses ke sumber air untuk minum - Akses ke sumber air untuk memasak - Akses ke sumber air untuk mandi, cuci, dll. - Sanitasi	- Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum; - Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk minum. - Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak; - Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk memasak. - Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, cuci, dll; - Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk mandi, cuci, dll. - Fasilitas tempat buang air besar, dan siapa saja yang menggunakan; - Jenis jamban, kloset yang digunakan rumah tangga; - Lokasi tempat pembuangan akhir tinja.
Keterjangkauan	- Komunikasi - Status rumah - Kondisi rumah	- Keluarga yang berlangganan telepon kabel. - Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. - Bahan bangunan utama atap rumah terluas; - Bahan bangunan utama dinding rumah terluas; - Bahan bangunan utama lantai rumah terluas.

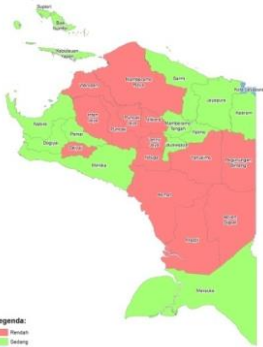
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
	• Air isi ulang • Perpipahan • Penerangan • Energi memasak	• Cara memperoleh air minum yang bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang dan leding eceran. • Sumber air minum, mandi, cuci, memasak menggunakan perpipaan atau hidran umum. • Sumber penerangan utama rumah. • Jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak.
• Keberlanjutan	• Limbah • Wilayah sutet • Permukiman kumuh • Modal sosial	• Keberadaan permukiman di bantaran sungai; • Pembuangan limbah pabrik, industri, usaha ke sungai. • Keberadaan wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet). • Keberadaan permukiman kumuh di desa atau kelurahan. • Keberadaan kebiasaan gotong royong warga di desa atau kelurahan.
• Stabilitas	• Mitigasi bencana	• Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; • Keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; • Keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan.

Hasil Analisis Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Boven Digoel	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF RENDAH RENDAH : 15 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 13 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA
02.	Deiyai			
03.	Dogiyai			
04.	Intan Jaya			
05.	Kepulauan Yapen			
06.	Lanny Jaya			
07.	Mappi			
08.	Memberamo Raya			
09.	Nabire			
10.	Paniai			
11.	Pegunungan Bintang			
12.	Puncak			
13.	Supiori			
14.	Waropen			
15.	Yahukimo			
16.	Asmat	Sedang	Prioritas 2	
17.	Biak Numfor			
18.	Jaya Wijaya			
19.	Jayapura			
20.	Keerom			
21.	Membramo Tengah			
22.	Merauke			
23.	Mimika			
24.	Nduga			
25.	Puncak Jaya			
26.	Sarmi			
27.	Tolikara			
28.	Kota Jayapura			
29.	Yalimo	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

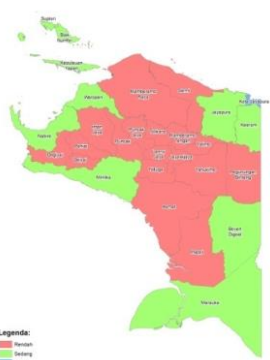
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.	Asmat Boven Digoel Deiyai Intan Jaya Lanny Jaya Mappi Memberamo Raya Nduga Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Tolikara Waropen Yahukimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke dalam lubang, sungai, saluran irigasi, danau, laut, got dan selokan; - Terbatasnya ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); - Masih minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kawasan perumahan dan permukiman untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Peningkatan fasilitas pendukung kawasan perumahan dan permukiman. Kegiatan: - Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle); - Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); - Penyediaan prasarana dan sarana untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. Pelaksana: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Perindustrian; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	Biak Numfor Dogiyai Jaya Wijaya Jayapura Keerom Kepulauan Yapen Membramo Tengah Merauke Mimika Nabire Paniai Sarmi Supiori Yalimo	Sedang	Prioritas 2	
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.	Asmat Dogiyai Intan Jaya Jaya Wijaya Lanny Jaya Mappi Membramo Tengah Nduga Puncak Tolikara Yahukimo Yalimo	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: - Masih banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum utama yang berasal dari (1) sumur bor/pompa, mata air terlindung, yang jaraknya kurang dari 10 meter; (2) mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi); - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas buang air besar, karena faktor sosial budaya, atau dikarenakan tidak adanya fasilitas tempat buang air besar; - Terbatasnya lokasi pembuangan akhir tinja yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan akhirnya di buang ke kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.	Boven Digoel Deiyai Jayapura Keerom Memberamo Raya Merauke Mimika Nabire Paniai Pegunungan Bintang Puncak Jaya Sarmi Supiori Kota Jayapura	Sedang	Prioritas 2	2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): - Program: - Peningkatan akses ke sumber air untuk minum dan sanitasi layak. - Kegiatan: - Peningkatan akses sumber air untuk minum bagi rumah tangga yang berasal dari leding; - Optimalisasi ketersediaan air baku; - Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); - Meningkatkan pelayanan kepada rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat; - Membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal; - Meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). - Pelaksana: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Kesehatan; - BUMN/BUMD; - Pemerintah Daerah.
27. 28. 29.	Biak Numfor Kepulauan Yapen Waropen	Tinggi	Prioritas 3	
Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Asmat Deiyai Dogiyai Intan Jaya Jaya Wijaya Lanny Jaya Mappi Memberamo Raya Membramo Tengah Nduga Paniai Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Sarmi Tolikara Yahukimo Yalimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Rendahnya kualitas bangunan rumah sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan, seperti (1) bahan bangunan utama atap rumah terluas berasal dari asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya; (2) bahan bangunan utama dinding rumah terluas berasal dari plesteran anyaman bambu / kawat, kayu, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu; (3) bahan bangunan utama lantai rumah terluas berasal dari bambu, kayu / papan kualitas rendah, tanah, dan lainnya; • Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan sumber air untuk minum, memasak, mandi dan cuci, berasal dari perpipahan atau hidran umum; • Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan penerangan utama rumah berasal dari listrik; • Masih banyak rumah tangga yang menggunakan bahan bakar utamanya berasal dari kayu bakar.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	Biak Numfor Boven Digoel Jayapura Keerom Kepulauan Yapen Merauke Mimika Nabire Supiori Waropen	Sedang	Prioritas 2	❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). • Kegiatan: - Menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; - Memperluas jaringan distribusi air bersih bagi rumah tangga; - Subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah; - Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. • Pelaksana: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Pemerintah Daerah.
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Membramo Tengah	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: • Terdapat permukiman di bantaran sungai; • Banyak rumah tangga dan industri yang membuang limbah ke sungai; • Terdapat wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet); • Terdapat permukiman kumuh di desa atau kelurahan. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Relokasi permukiman penduduk dan pemberdayaan masyarakat. • Kegiatan: - Relokasi permukiman dari bantaran sungai dan kumuh; - Pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu. • Pelaksana: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah.
02.	Puncak			
03.	Yalimo			
04.	Kota Jayapura			
05.	Deiyai	Sedang	Prioritas 2	
06.	Intan Jaya			
07.	Jayapura			
08.	Kepulauan Yapen			
09.	Mimika			
10.	Nabire			
11.	Puncak Jaya			
12.	Supiori			
13.	Tolikara			
14.	Yahukimo			
15.	Biak Numfor	Tinggi	Prioritas 3	
16.	Boven Digoel			
17.	Dogiyai			
18.	Jaya Wijaya			
19.	Keerom			
20.	Lanny Jaya			
21.	Mappi			
22.	Memberamo Raya			
23.	Merauke			
24.	Nduga			
25.	Paniai			
26.	Pegunungan Bintang			
27.	Sarmi			
28.	Waropen			
29.	Kota Jayapura			
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Biak Numfor	N/A	-	1 Permasalahan Utama: - Minimnya keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; - Minimnya keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; - Minimnya keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): - Program: - Mitigasi bencana. - Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. - Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Boven Digoel	N/A	-	
03.	Dogiyai	N/A	-	
04.	Kepulauan Yapen	N/A	-	
05.	Lanny Jaya	N/A	-	
06.	Mappi	N/A	-	
07.	Memberamo Raya	N/A	-	
08.	Nabire	N/A	-	
09.	Paniai	N/A	-	
10.	Pegunungan Bintang	N/A	-	
11.	Puncak	N/A	-	
12.	Tolikara	N/A	-	
13.	Intan Jaya	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: - Minimnya keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; - Minimnya keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; - Minimnya keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): - Program: - Mitigasi bencana. - Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. - Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
14.	Membramo Tengah			
15.	Supiori			
16.	Waropen			
17.	Yahukimo			
18.	Asmat	Sedang	Prioritas 2	
19.	Deiyai			
20.	Jaya Wijaya			
21.	Keerom			
22.	Merauke			
23.	Mimika			
24.	Nduga			
25.	Puncak Jaya			
26.	Sarmi			
27.	Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
28.	Yalimo			
29.	Kota Jayapura			
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.5

Tematik:

Ketahanan Pangan

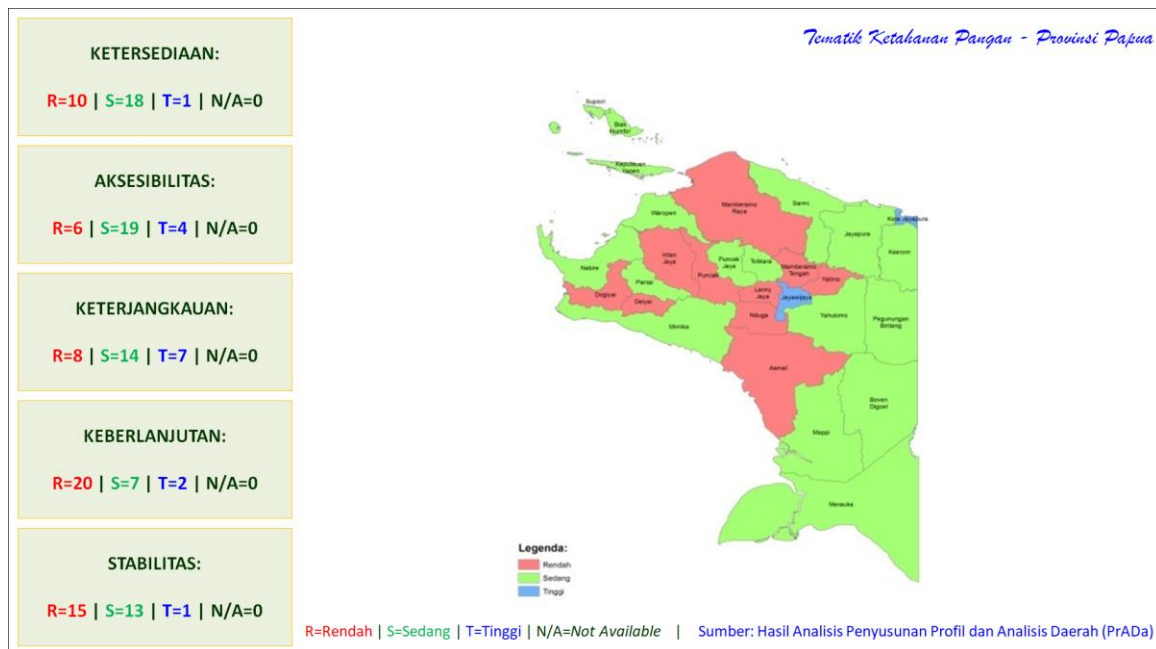
Provinsi Papua



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
• Ketersediaan	• Produktivitas pangan • Produksi perikanan • Produksi peternakan • Konsumsi sereal • Lahan irigasi	• Produktivitas padi sawah; • Produktivitas padi ladang; • Produktivitas jagung; • Produktivitas kacang hijau; • Produktivitas kacang tanah; • Produktivitas kedelai; • Produktivitas ubi kayu; • Produktivitas ubi jalar. • Produksi perikanan tangkap; • Produksi unggas; • Produksi ternak. • Konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih sereal. • Rasio luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah;
• Aksesibilitas	• Infrastruktur • Akses ke pasar	• Indeks kepadatan jalan; • Jalan mantab. • Rasio desa dengan bangunan pasar permanen/semi permanen; • Rata-rata perkiraan jarak ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen terdekat.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
Keterjangkauan	- Kemiskinan - Pengeluaran perkapita	- Angka kemiskinan; - Indeks kedalaman kemiskinan (P1); - Indeks keparahan kemiskinan (P2). - Pengeluaran perkapita.
Keberlanjutan	- Tenaga kerja - Lahan pertanian - Populasi peternakan	- Rasio rumah tangga tanaman pangan (RTTP); - Rasio rumah tangga perikanan budidaya; - Rasio rumah tangga perikanan tangkap. - Rasio luas lahan terhadap RTTP; - Laju konversi lahan pertanian rata-rata (dalam 5 tahun atau lebih). - Populasi ternak; - Populasi unggas.
Stabilitas	Mitigasi bencana	- Kerawanan bencana banjir; - Kerawanan bencana tanah longsor; - Kerawanan bencana cuaca ekstrim; - Kerawanan bencana kekeringan.

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Pangan
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF SEDANG RENDAH : 11 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 17 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA
02.	Deiyai			
03.	Dogiyai			
04.	Intan Jaya			
05.	Jayawijaya			
06.	Lanny Jaya			
07.	Mamberamo Raya			
08.	Mamberamo Tengah			
09.	Nduga			
10.	Puncak			
11.	Yalimo			
12.	Biak Numfor	Sedang	Prioritas 2	
13.	Boven Digoel			
14.	Jayapura			
15.	Kepulauan Yapen			
16.	Mappi			
17.	Merauke			
18.	Mimika			
19.	Nabire			
20.	Paniai			
21.	Pegunungan Bintang			
22.	Puncak Jaya			
23.	Sarmi			
24.	Supiori			
25.	Tolikara			
26.	Waropen			
27.	Yahukimo			
28.	Keerom			
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.	Deiyai Dogiyai Intan Jaya Lanny Jaya Mamberamo Raya Mambramo Tengah Nduga Puncak Supiori Yalimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Rendahnya produktivitas padi sawah, padi ladang, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar; • Rendahnya produksi perikanan tangkap/budidaya; • Rendahnya produksi unggas/ternak; • Konsumsi sereralia lebih tinggi dibandingkan produksi di dalam kabupaten/kota; • Rendahnya persentase luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; • Rendahnya rasio sawah irigasi terhadap luas lahan sawah total. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Ketahanan pangan. • Kegiatan: - Peningkatan produksi hasil pertanian; - Penerapan teknologi pertanian; - Pemberdayaan penyuluh pertanian; - Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan; - Peningkatan produksi peternakan dan penerapan teknologi peternakan; - Peningkatan ketahanan pangan; - Pembukaan sawah dan pembuatan saluran irigasi. • Pelaksana: - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	Asmat Biak Numfor Boven Digoel Jayapura Jayawijaya Keerom Kepulauan Yapen Mappi Merauke Mimika Nabire Paniai Pegunungan Bintang Puncak Jaya Sarmi Tolikara Waropen Yahukimo	Sedang	Prioritas 2	
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan	
01. 02. 03. 04. 05. 06.	Asmat Mappi Nduga Pegunungan Bintang Tolikara Yahukimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Rendahnya kepadatan jalan (panjang ruas jalan per 100 km2 luas wilayah); • Rendahnya rasio jalan mantab; • Tingginya rasio desa tanpa bangunan permanen maupun semi permanen; • Jarak rata-rata desa ke pasar permanen/semi permanen terdekat terlampau jauh. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Ketahanan pangan. • Kegiatan: - Pembangunan, pemeliharaan jalan; - Pembangunan pasar permanen/semi permanen; - Rehabilitasi bangunan pasar. • Pelaksana: - Kementerian Pertanian; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perdagangan; - Pemerintah Daerah.	
07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.	Biak Numfor Boven Digoel Deiyai Dogiyai Intan Jaya Jayapura Keerom Kepulauan Yapen Lanny Jaya Mamberamo Raya Mambramo Tengah Merauke Nabire Paniai Puncak Puncak Jaya Sarmi Waropen Yalimo	Sedang	Prioritas 2		
26. 27. 28. 29.	Jayawijaya Mimika Supiori Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3		
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.	Deiyai Intan Jaya Jayawijaya Lanny Jaya Supiori Waropen Yahukimo Yalimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Tingginya angka kemiskinan; • Tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan; • Pengeluaran per kapita di wilayah kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata provinsi; ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Penanggulangan kemiskinan. • Kegiatan: - Peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, khususnya yang bekerja di sektor pertanian; • Pelaksana: - Kementerian Sosial; - Pemerintah Daerah.
09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Asmat Biak Numfor Dogiyai Kepulauan Yapen Mamberamo Raya Mambramo Tengah Mappi Nabire Nduga Paniai Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Tolikara	Sedang	Prioritas 2	
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	Boven Digoel Jayapura Keerom Merauke Mimika Sarmi Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan	
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Rendahnya persentase rumah tangga tanaman pangan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; • Rendahnya penguasaan lahan pertanian; • Masih tingginya lahan potensial yang menganggur; • Rendahnya populasi ternak dan unggas. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; • Kegiatan: - Peningkatan kesejahteraan petani; - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; - Penataan ruang; - Pemberian bibit ternak dan unggas; - Penanggulangan penyakit ternak dan unggas. • Pelaksana: - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Pemerintah Daerah.	
02.	Biak Numfor				
03.	Deiyai				
04.	Dogiyai				
05.	Intan Jaya				
06.	Jayapura				
07.	Kepulauan Yapen				
08.	Lanny Jaya				
09.	Mamberamo Raya				
10.	Mambramo Tengah				
11.	Mimika				
12.	Nabire				
13.	Nduga				
14.	Paniai				
15.	Puncak				
16.	Puncak Jaya				
17.	Tolikara				
18.	Yahukimo				
19.	Yalimo				
20.	Kota Jayapura				
21.	Boven Digoel	Sedang	Prioritas 2		
22.	Keerom				
23.	Mappi				
24.	Merauke				
25.	Sarmi				
26.	Supiori				
27.	Waropen				
28.	Jayawijaya	Tinggi	Prioritas 3		
29.	Pegunungan Bintang				
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)	

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Boven Digoel Deiyai Dogiyai Intan Jaya Keerom Mamberamo Raya Mambramo Tengah Mappi Merauke Mimika Paniai Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Waropen	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Tingginya kerawanan bencana banjir; • Tingginya Kerawanan bencana Tanah longsor; • Tingginya Kerawanan bencana kekeringan. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Mitigasi bencana. • Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	Asmat Biak Numfor Jayapura Jayawijaya Kepulauan Yapen Lanny Jaya Nabire Nduga Sarmi Supiori Tolikara Yahukimo Yalimo	Sedang	Prioritas 2	
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.6

Tematik:

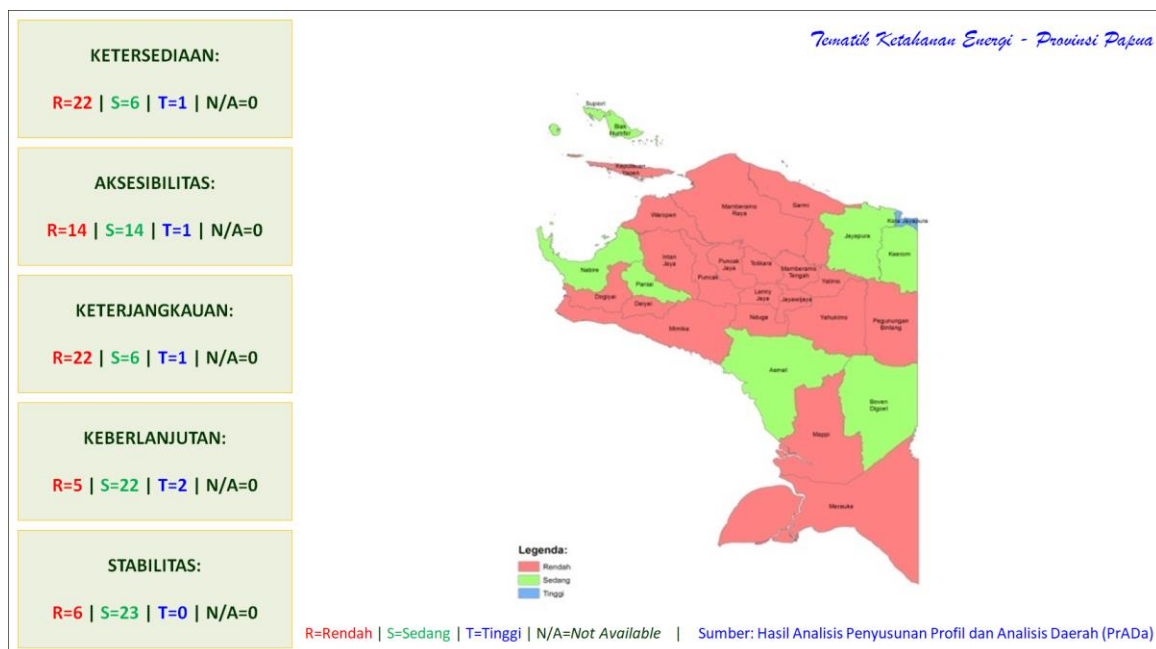
Ketahanan Energi

Provinsi Papua



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Energi Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
• Ketersediaan		• Keluarga pengguna listrik PLN; • Penerangan di jalan utama desa/kelurahan (listrik diusahakan pemerintah).
• Aksesibilitas		• Keluarga pengguna listrik PLN; • Keluarga pengguna listrik Non PLN; • Penerangan di jalan utama desa/kelurahan; • Penerangan di jalan utama desa/kelurahan, listrik diusahakan pemerintah; • Penerangan di jalan utama desa/kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah).
• Keterjangkauan		• Bahan Bakar untuk memasak yang digunakan sebagian besar keluarga (gas kota, LPG, minyak tanah, kayu bakar); • Keluarga tanpa listrik; • Tidak ada penerangan di jalan utama desa/kelurahan.
• Keberlanjutan		• Keluarga pengguna listrik PLN • Penerangan di jalan utama desa/kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah)
• Stabilitas		• Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Energi Provinsi Papua



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Energi	
01.	Deiyai	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK KETAHANAN ENERGI KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF RENDAH RENDAH : 20 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 8 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA	
02.	Dogiyai				
03.	Intan Jaya				
04.	Jayawijaya				
05.	Kepulauan Yapen				
06.	Lanny Jaya				
07.	Mamberamo Raya				
08.	Mambramo Tengah				
09.	Mappi				
10.	Merauke				
11.	Mimika				
12.	Nduga				
13.	Pegunungan Bintang				
14.	Puncak				
15.	Puncak Jaya				
16.	Sarmi				
17.	Tolikara				
18.	Waropen				
19.	Yahukimo				
20.	Yalimo				
21.	Asmat	Sedang	Prioritas 2		
22.	Biak Numfor				
23.	Boven Digoel				
24.	Jayapura				
25.	Keerom				
26.	Nabire				
27.	Paniai				
28.	Supiori				
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3		
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)	

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Minimnya ketersediaan jaringan listrik PLN di beberapa wilayah permukiman penduduk; • Minimnya ketersediaan lampu penerangan di beberapa jalan utama. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Ketahanan energi. • Kegiatan: - Peningkatan jaringan distribusi listrik PLN yang dapat menjangkau permukiman penduduk; - Pemasangan lampu penerangan di jalan utama. • Pelaksana: - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; - Pemerintah Daerah.
02.	Boven Digoel			
03.	Deiyai			
04.	Dogiyai			
05.	Intan Jaya			
06.	Jayawijaya			
07.	Kepulauan Yapen			
08.	Lanny Jaya			
09.	Mamberamo Raya			
10.	Mambramo Tengah			
11.	Mappi			
12.	Mimika			
13.	Nduga			
14.	Paniai			
15.	Pegunungan Bintang			
16.	Puncak			
17.	Puncak Jaya			
18.	Sarmi			
19.	Tolikara			
20.	Waropen			
21.	Yahukimo			
22.	Yalimo			
23.	Biak Numfor	Sedang	Prioritas 2	
24.	Jayapura			
25.	Keerom			
26.	Merauke			
27.	Nabire			
28.	Supiori			
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	 Legenda: Rendah Sedang Tinggi
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				
				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.	Deiyai Dogiyai Intan Jaya Jayawijaya Lanny Jaya Mamberamo Raya Mappi Nduga Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Tolikara Yahukimo Yalimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Sulitnya masyarakat mengakses listrik PLN, karena keterbatasan layanan sambungan listrik PLN; ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Ketahanan energi. • Kegiatan: - Peningkatan layanan listrik PLN; • Pelaksana: - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; - Pemerintah Daerah.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	Asmat Biak Numfor Boven Digoel Jayapura Keerom Kepulauan Yapen Mamberamo Tengah Merauke Mimika Nabire Paniai Sarmi Supiori Waropen	Sedang	Prioritas 2	
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

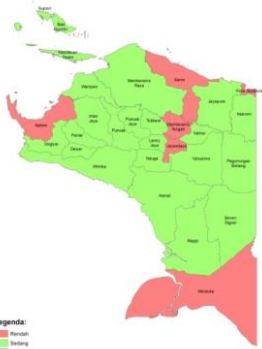
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Biak Numfor Deiyai Intan Jaya Jayapura Jayawijaya Keerom Kepulauan Yapen Mamberamo Tengah Mappi Merauke Mimika Nabire Nduga Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Sarmi Supiori Tolikara Waropen Yahukimo Yalimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Ketahanan energi. Kegiatan: - Sosialisasi penggunaan LPG dan bahan bakar efektif dan efisien untuk masyarakat. Pelaksana: - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Pemerintah Daerah.
23. 24. 25. 26. 27. 28.	Asmat Boven Digoel Dogiyai Lanny Jaya Mamberamo Raya Paniai	Sedang	Prioritas 2	
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi	
01. 02. 03. 04. 05.	Intan Jaya Lanny Jaya Nduga Puncak Yahukimo	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Beberapa kebutuhan energi listriknya terbantu dari supply non-PLN namun masih belum mencukupi seluruh kebutuhan energi. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Ketahanan energi. Kegiatan: - Mendorong pengembangan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak swasta, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Pelaksana: - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Swasta; - Pemerintah Daerah.	
06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.	Asmat Biak Numfor Boven Digoel Deiyai Dogiyai Jayapura Jayawijaya Keerom Kepulauan Yapen Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Mappi Merauke Mimika Paniai Pegunungan Bintang Puncak Jaya Supiori Tolikara Waropen Yalimo Kota Jayapura	Sedang	Prioritas 2		
28. 29.	Nabire Sarmi	Tinggi	Prioritas 3		
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi
01.	Jayawijaya	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: ● Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): ● Program: - Mitigasi bencana. ● Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. ● Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Mamberamo Tengah			
03.	Merauke			
04.	Nabire			
05.	Sarmi			
06.	Kota Jayapura			
07.	Asmat	Sedang	Prioritas 2	
08.	Biak Numfor			
09.	Boven Digoel			
10.	Deiyai			
11.	Dogiyai			
12.	Intan Jaya			
13.	Jayapura			
14.	Keerom			
15.	Kepulauan Yapen			
16.	Lanny Jaya			
17.	Mamberamo Raya			
18.	Mappi			
19.	Mimika			
20.	Nduga			
21.	Paniai			
22.	Pegunungan Bintang			
23.	Puncak			
24.	Puncak Jaya			
25.	Supiori			
26.	Tolikara			
27.	Waropen			
28.	Yahukimo			
29.	Yalimo			
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.7

Tematik:

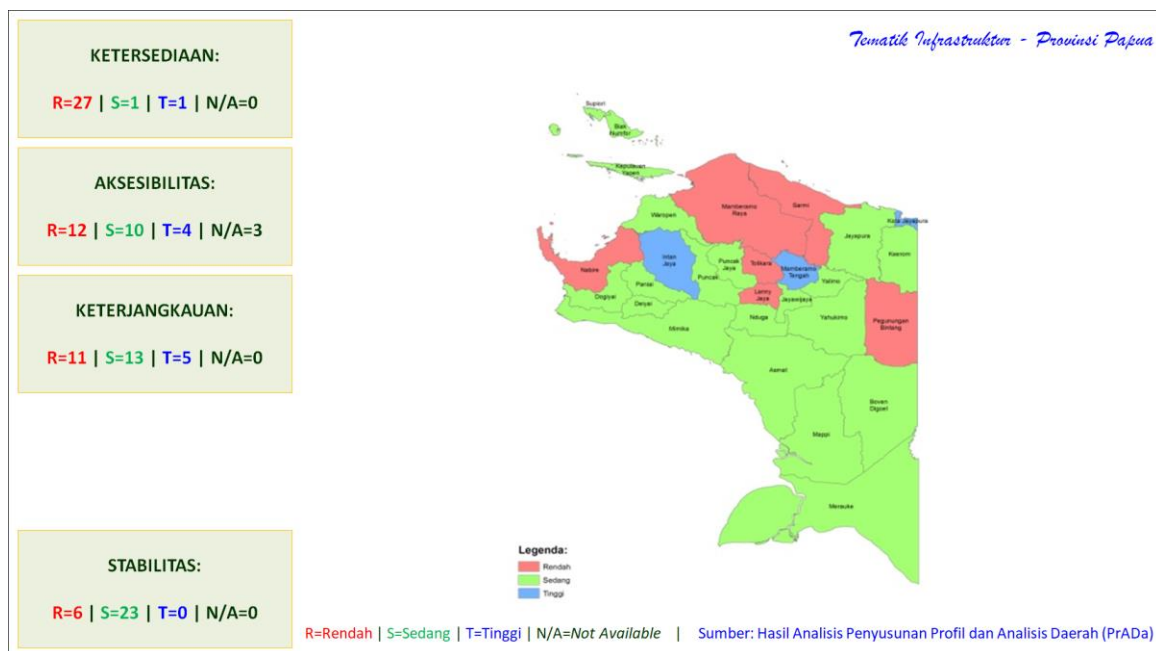
Infrastruktur

Provinsi Papua



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Infrastruktur Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
• Ketersediaan		• Panjang ruas jalan provinsi; • Rasio irigasi.
• Aksesibilitas		• Rasio jalan mantab provinsi.
• Keterjangkauan		• Presentase anggaran belanja infrastruktur terhadap dana APBD kabupaten/kota.
• Stabilitas		• Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Infrastruktur Provinsi Papua



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Infrastruktur
01.	Lanny Jaya	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK INFRASTRUKTUR KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF SEDANG RENDAH : 6 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 20 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA
02.	Mamberamo Raya			
03.	Nabire			
04.	Pegunungan Bintang			
05.	Sarmi			
06.	Tolikara			
07.	Asmat	Sedang	Prioritas 2	
08.	Biak Numfor			
09.	Boven Digoel			
10.	Deiyai			
11.	Dogiyai			
12.	Jayapura			
13.	Jayawijaya			
14.	Keerom			
15.	Kepulauan Yapen			
16.	Mappi			
17.	Merauke			
18.	Mimika			
19.	Nduga			
20.	Paniai			
21.	Puncak			
22.	Puncak Jaya			
23.	Supiori			
24.	Waropen			
25.	Yahukimo			
26.	Yalimo			
27.	Intan Jaya	Tinggi	Prioritas 3	
28.	Mamberamo Tengah			
29.	Kota Jayapura			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: - Tingginya persentase jalan dengan permukaan tanah, kerikil dan batuan yang diperkeras; - Terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk akses informasi, khususnya di perdesaan dan daerah terpencil; 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Peningkatan kualitas jalan; - Peningkatan akses telekomunikasi; - Pengembangan transportasi darat/laut. Kegiatan: - Peningkatan kualitas jalan beraspal; - Pengembangan sistem telekomunikasi; - Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan dan dermaga. Pelaksana: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Pemerintah Daerah.
02.	Biak Numfor	Rendah		
03.	Boven Digoel	Rendah		
04.	Deiyai	Rendah		
05.	Dogiyai	Rendah		
06.	Intan Jaya	Rendah		
07.	Jayawijaya	Rendah		
08.	Keerom	Rendah		
09.	Kepulauan Yapen	Rendah		
10.	Lanny Jaya	Rendah		
11.	Mamberamo Raya	Rendah		
12.	Mamberamo Tengah	Rendah		
13.	Mappi	Rendah		
14.	Merauke	Rendah		
15.	Mimika	Rendah		
16.	Nabire	Rendah		
17.	Nduga	Rendah		
18.	Paniai	Rendah		
19.	Pegunungan Bintang	Rendah		
20.	Puncak	Rendah		
21.	Puncak Jaya	Rendah		
22.	Sarmi	Rendah		
23.	Supiori	Rendah		
24.	Tolikara	Rendah		
25.	Waropen	Rendah		
26.	Yahukimo	Rendah		
27.	Yalimo	Rendah		
28.	Jayapura	Sedang	Prioritas 2	
29.	Kota Jayapura	Tinggi	Prioritas 3	
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur	
01.	Asmat	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: - Waktu tempuh cukup lama karena terkendala beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan; - Rendahnya kondisi jalan mantab; - Belum banyak terhubungnya jaringan jalan antarkota dan antardesa yang baik, karena kendala operasional, keamanan, pembebasan lahan hak ulayat, dan aspek lingkungan dan kehutanan. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kegiatan: - Peningkatan kualitas jalan dan perluasan kemantapan jalan beraspal. Pelaksana: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Daerah.	
02.	Boven Digoel	Rendah			
03.	Keerom	Rendah			
04.	Lanny Jaya	Rendah			
05.	Nabire	Rendah			
06.	Pegunungan Bintang	Rendah			
07.	Puncak	Rendah			
08.	Puncak Jaya	Rendah			
09.	Supiori	Rendah			
10.	Tolikara	Rendah			
11.	Waropen	Rendah			
12.	Yalimo	Rendah			
13.	Biak Numfor	Sedang	Prioritas 2		
14.	Deiyai	Sedang			
15.	Jayapura	Sedang			
16.	Jayawijaya	Sedang			
17.	Kepulauan Yapen	Sedang			
18.	Mamberamo Tengah	Sedang			
19.	Mappi	Sedang			
20.	Merauke	Sedang			
21.	Mimika	Sedang			
22.	Kota Jayapura	Sedang			
23.	Nduga	N/A	-		
24.	Mamberamo Raya	N/A	-		
25.	Sarmi	N/A	-		
26.	Dogiyai	Tinggi	Prioritas 3		
27.	Intan Jaya	Tinggi			
28.	Paniai	Tinggi			
29.	Yahukimo	Tinggi			
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)	

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.	Deiyai Dogiyai Jayapura Kepulauan Yapen Lanny Jaya Mappi Nabire Paniai Pegunungan Bintang Tolikara Yahukimo	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: - Biaya transportasi yang cukup mahal. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Kegiatan: - Penyediaan transportasi publik bagi masyarakat miskin. Pelaksana: - Kementerian Sosial; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Daerah.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.	Asmat Biak Numfor Boven Digoel Jayawijaya Keerom Merauke Mimika Puncak Jaya Sarmi Supiori Waropen Yalimo Kota Jayapura	Sedang	Prioritas 2	
25. 26. 27. 28. 29.	Intan Jaya Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Nduga Puncak	Tinggi	Prioritas 3	
Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur
01.	Jayapura	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: ● Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): ● Program: - Mitigasi bencana. ● Kegiatan: - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. ● Pelaksana: - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Mamberamo Raya			
03.	Merauke			
04.	Nabire			
05.	Sarmi			
06.	Kota Jayapura			
07.	Asmat	Sedang	Prioritas 2	
08.	Biak Numfor			
09.	Boven Digoel			
10.	Deiyai			
11.	Dogiyai			
12.	Intan Jaya			
13.	Jayawijaya			
14.	Keerom			
15.	Kepulauan Yapen			
16.	Lanny Jaya			
17.	Mamberamo Tengah			
18.	Mappi			
19.	Mimika			
20.	Nduga			
21.	Paniai			
22.	Pegunungan Bintang			
23.	Puncak			
24.	Puncak Jaya			
25.	Supiori			
26.	Tolikara			
27.	Waropen			
28.	Yahukimo			
29.	Yalimo			
 Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.8

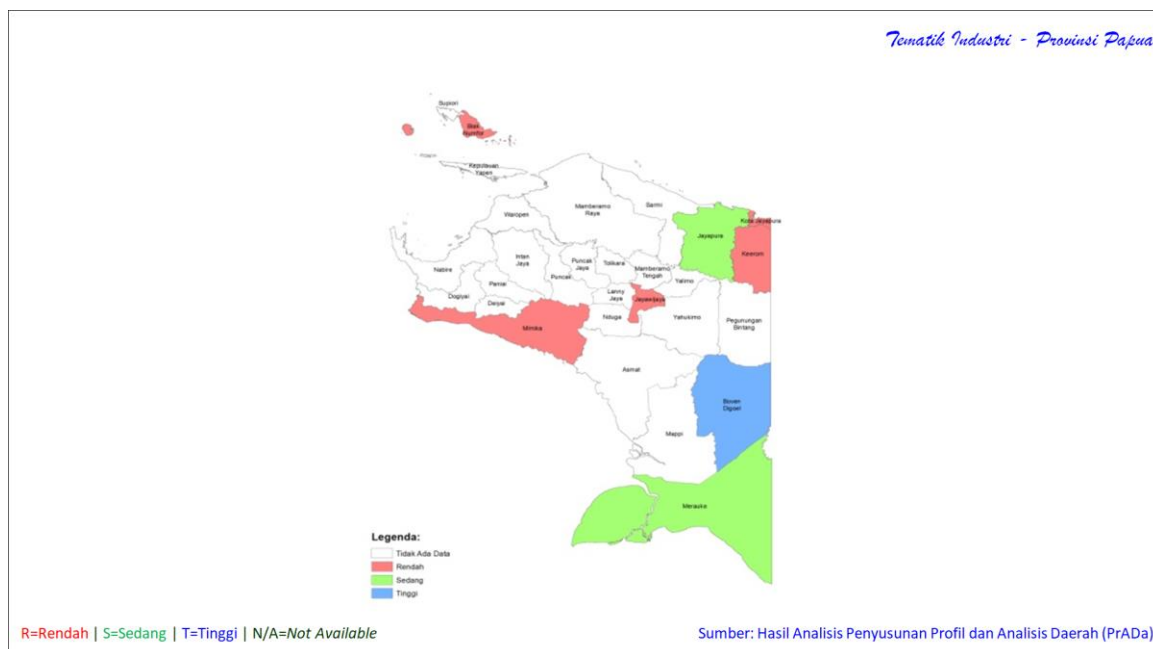
Tematik:

Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan Provinsi Papua



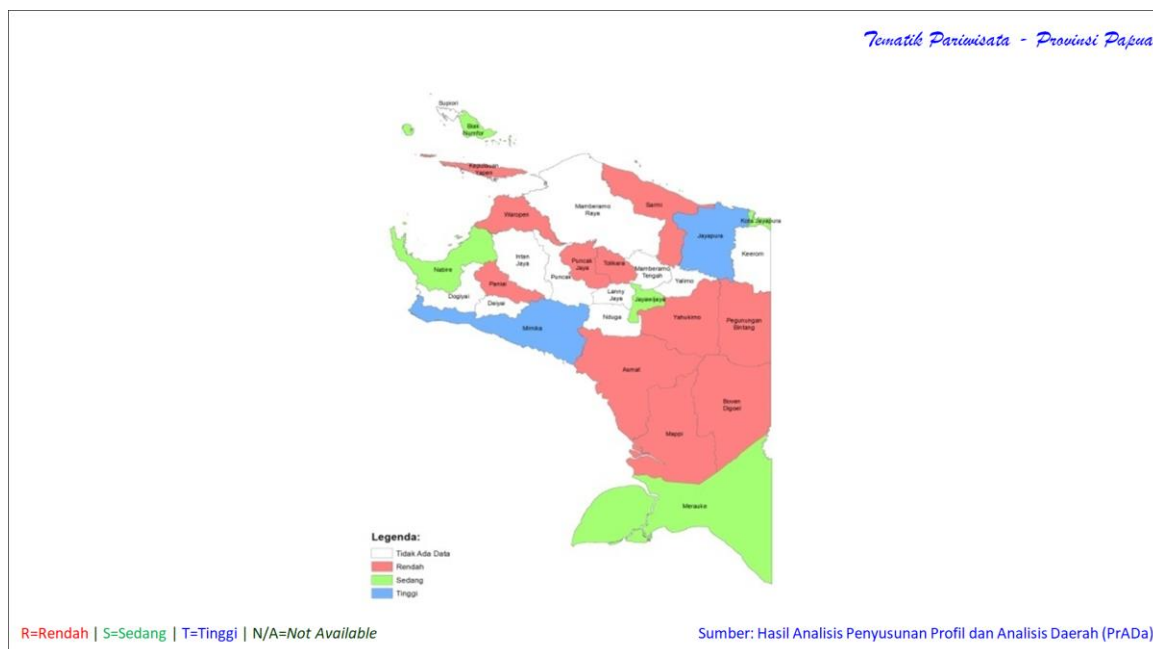
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Industri dan Pariwisata Provinsi Papua		
Kategori	Komponen	Indikator
• Industri		• Jumlah tenaga kerja; • Nilai investasi; • Nilai produksi.
• Pariwisata		• Akomodasi; • Jumlah kamar; • Jumlah tempat tidur; • Jumlah restoran; • Jumlah objek wisata.

Hasil Analisis Tematik Industri Provinsi Papua



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Industri
01.	Deiyai	N/A	-	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK INDUSTRI KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF RENDAH RENDAH : 4 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 3 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA Permasalahan Utama: Masih terbatasnya investasi di sektor industri di beberapa kabupaten/kota.
02.	Dogiyai	N/A	-	
03.	Intan Jaya	N/A	-	
04.	Kepulauan Yapen	N/A	-	
05.	Lanny Jaya	N/A	-	
06.	Mappi	N/A	-	
07.	Memberamo Raya	N/A	-	
08.	Membramo Tengah	N/A	-	
09.	Nabire	N/A	-	
10.	Nduga	N/A	-	
11.	Paniai	N/A	-	
12.	Pegunungan Bintang	N/A	-	
13.	Puncak	N/A	-	
14.	Puncak Jaya	N/A	-	
15.	Sarmi	N/A	-	
16.	Supiori	N/A	-	
17.	Tolikara	N/A	-	
18.	Waropen	N/A	-	
19.	Yahukimo	N/A	-	
20.	Yalimo	N/A	-	
21.	Jaya Wijaya	Rendah	Prioritas 1	
22.	Keerom			
23.	Mimika			
24.	Kota Jayapura			
25.	Jayapura	Sedang	Prioritas 2	
26.	Merauke			
27.	Yalimo			
28.	Dogiyai	Tinggi	Prioritas 3	
29.	Memberamo Raya			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Tematik Pariwisata Provinsi Papua



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pariwisata
01.	Asmat	N/A	-	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF RENDAH RENDAH : 10 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 6 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA Permasalahan Utama: Terbatasnya penunjang sektor pariwisata, seperti ketersediaan akomodasi, restoran dan infrastruktur pendukung lainnya, di beberapa kabupaten/kota.
02.	Biak Numfor	N/A	-	
03.	Boven Digoel	N/A	-	
04.	Intan Jaya	N/A	-	
05.	Jayapura	N/A	-	
06.	Kepulauan Yapen	N/A	-	
07.	Lanny Jaya	N/A	-	
08.	Merauke	N/A	-	
09.	Nduga	N/A	-	
10.	Puncak	N/A	-	
11.	Tolikara	N/A	-	
12.	Jaya Wijaya	Rendah	Prioritas 2	
13.	Keerom	Rendah		
14.	Mimika	Rendah		
15.	Nabire	Rendah		
16.	Paniai	Rendah		
17.	Pegunungan Bintang	Rendah		
18.	Puncak Jaya	Rendah		
19.	Sarmi	Rendah		
20.	Supiori	Rendah		
21.	Kota Jayapura	Rendah		
22.	Deiyai	Sedang	Prioritas 2	
23.	Mappi	Sedang		
24.	Membramo Tengah	Sedang		
25.	Waropen	Sedang		
26.	Yahukimo	Sedang		
27.	Yalimo	Sedang		
28.	Dogiyai	Tinggi	Prioritas 3	
29.	Memberamo Raya	Tinggi		
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

**Sektor Unggulan³
Provinsi Papua**

- ❶ Sektor pendorong perekonomian provinsi Papua adalah pertambangan;
- ❷ Investasi di provinsi Papua berpotensi meningkat seiring rencana eksplorasi dan peralihan *underground mining*;
- ❸ Kenaikan kuota ekspor dan proses negosiasi izin usaha pertambangan yang secara umum sudah menemui kesepakatan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Papua;
- ❹ Ekspor pertambangan ke luar negeri diperkirakan memiliki pengaruh dominan dalam perekonomian, seiring dengan adanya rekomendasi kenaikan kuota ekspor konsentrat tembaga dari 1,1 juta ton pada tahun 2017 menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2018;
- ❺ Optimalisasi peluang terhadap konsesus dari IMF dan World Bank, bahwa harga komoditas tembaga pada tahun 2018 diperkirakan mengalami kenaikan seiring pasokan tembaga dunia yang menipis;
- ❻ Proses eksplorasi *underground mining* yang direncanakan awal tahun 2018 akan menjadi faktor pendorong kinerja investasi, selain percepatan pembangunan beberapa proyek strategis yang sebelumnya telah berjalan;
- ❼ Permintaan di pasar global yang diperkirakan meningkat juga menjadi faktor pendorong kinerja produksi pertambangan;
- ❽ Konstruksi juga diperkirakan mengalami kenaikan yang didorong oleh rencana eksplorasi *underground mining* dan percepatan realisasi proyek PON 2020. Kondisi tersebut juga akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja lapangan usaha administrasi pemerintahan.

3 Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

PENUTUP



5.1. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil analisis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian tematik RATA-RATA kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- ① Pendidikan, tingkat capaian SEDANG hingga RENDAH;
- ② Kesehatan, tingkat capaian RENDAH;
- ③ Penanggulangan Kemiskinan, tingkat capaian RENDAH;
- ④ Perumahan dan Permukiman, tingkat capaian RENDAH;
- ⑤ Ketahanan Pangan, tingkat capaian SEDANG;
- ⑥ Ketahanan Energi, tingkat capaian RENDAH;
- ⑦ Infrastruktur, tingkat capaian SEDANG;
- ⑧ Industri, tingkat capaian RENDAH; dan Pariwisata, tingkat capaian RENDAH.

5.2. Rekomendasi

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) ini, oleh para pemangku kepentingan dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan, utamanya dalam rangka menyusun program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, sebagaimana yang telah diuraikan dan disajikan di dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) provinsi Papua ini.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Metode analisis ini relatif baru dan belum memiliki banyak referensi yang dapat digunakan, utamanya dalam rangka merumuskan program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Oleh karenanya penerapan metode THIS dalam penyusunan PrADa ini, dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.